



LAPORAN PENELITIAN
DIPA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2005

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUNIAN LIAR
(*Squtter settlement*): STUDI KASUS MASYARAKAT
DI SEKITAR BOZEM MOROKREMBANGAN
KOTA SURABAYA**

Oleh:

Drs. Sudarso, M.Si.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2005,
Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga
Nomor 4683/J03/PP/2005
Tanggal 4 Juli 2005
Nomor Urut : 49

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

November, 2005



LAPORAN PENELITIAN
DIPA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2005

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUNIAN LIAR
(Squatter settlement): STUDI KASUS MASYARAKAT
DI SEKITAR BOZEM MOROKREMBANGAN
KOTA SURABAYA**

Oleh:

Drs. Sudarso, M.Si.

KKB
KK-2
LP 95/08
Sud
S

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2005,
Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga
Nomor 4683/J03/PP/2005
Tanggal 4 Juli 2005
Nomor Urut : 49

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

November, 2005



IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. **Judul Penelitian** : **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUNIAN LIAR (*Squatter settlement*) STUDI KASUS MASYARAKAT DI SEKITAR BOZEM MOROKREMBANGAN KOTA SURABAYA**
- a. Macam Penelitian : Terapan
b. Kategori Penelitian : () I () II () III
2. **Kepala Proyek Penelitian**
a. Nama Lengkap dan gelar : Drs. SUDARSO, MSi
b. Jenis kelamin : Laki-laki
c. Pangkat/Gol/NIP : Penata/III D/ 132014462
d. Jabatan sekarang : Lektor
e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Sosiologi FISIP
f. Univ/Ins/Akademi : Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu : Sosial
3. Jumlah Tim Peneliti : 1 Orang
4. Lokasi Penelitian : Kota Surabaya
5. Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan
6. Biaya yang Diperlukan : Rp. 5.750.000,-
7. **Seminar Hasil Penelitian**
a. Dilaksanakan
Tanggal :
b. Hasil Penelitian : () Baik Sekali () Baik
() Sedang () Kurang

Surabaya, 22 November 2005

Mengetahui/Mengesahkan
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Airlangga,





Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP.130 701 125

RINGKASAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUNIAN LIAR (*Squatter settlement*) STUDI KASUS MASYARAKAT DI SEKITAR BOZEM MOROKREMBANGAN SURABAYA

Sudarso
(Sosiologi-FISIP Universitas Airlangga Surabaya)
(Tahun 2005, hal. 52)

Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Latar Belakang sosio-ekonomi penduduk di sekitar Bozem Morokrembangan Kodya Surabaya? (2) Bagaimana pandangan masyarakat tentang keberadaan Bozem Morokrembangan? (3) Problem-problem apa saja yang dihadapi penduduk di sekitar Bozem Morokrembangan ?

Tujuan penelitian ini adalah (1) ingin mengetahui karakteristik sosio-ekonomi penduduk di sekitar Bozem Morokrembangan Di Kota Surabaya, (2) mengetahui dan memberikan gambaran tentang riwayat munculnya hunian di Bozem, (3) memberikan gambaran pandangan dan problem-problem yang dihadapi para penduduk di daerah Bozem Morokrembangan.

Penelitian ini bertipe deskriptif, karena dalam analisisnya akan diungkapkan beberapa gambaran fakta-fakta empiris yang lebih menekankan pada informasi yang mendalam.

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk yang tinggal di sekitar Bozem Morokrembangan Kodya Surabaya, dimana diambil 75 responden, dengan tehnik purposive sampling. Dan juga dilakukan *in-depth interview* pada 5 orang yang memiliki dan pengaruh yang cukup signifikan di masyarakat sekitar Bozem Morokrembangan

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara: (1) Mewawancarai responden dengan menggunakan kuesioner kepada seluruh responden. (2) Melakukan wawancara mendalam dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat di dalam lingkungan tempat mereka tinggal.

Hasil dan kesimpulan yang didapat dari penelitian di daerah Bozem Morokrembangan adalah: (1) Penduduk Bozem Morokrembangan yang sebagian besar merupakan para migran merasakan adanya ketidakadilan dan kekhawatiran tentang status tanah yang mereka tinggali sehari-hari. Hal ini

bisa dilihat dari penerbitan sertifikat tanah. Ada beberapa penduduk yang sudah mendapatkan sertifikat atas tanahnya, sementara yang lain tidak bisa mendapatkan sertifikat tersebut. (2) Penduduk yang sudah lama tinggal di daerah Bozem, merasa perlunya adanya kontrol terhadap penambahan jumlah penduduk di daerah bozem tersebut. Sinyalemen ini terbukti adanya kecenderungan para migran baru menempati tanah kosong yang sebenarnya tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan bozem. (3) Masih tumpang tindihnya lembaga yang berperan dan bertanggung jawab pada pengelolaan Bozem. Hal ini terlihat tidak adanya koordinasi antar lembaga birokrasi, misalnya dinas pengairan, pemerintah propinsi, Pemerintah kota mulai dari dinas sampai kelurahan. (4) Pembenahan lingkungan bozem diharapkan oleh penduduk bisa berlangsung secara kontinu dan konsisten. (5) Penduduk berharap pemberdayaan bozem tidak meninggalkan tujuan utama adanya bozem yaitu mengurangi banjir.

Dari temuan pokok tersebut, maka ada beberapa rekomendasi yang bisa ditawarkan, yaitu:

1. Perlunya ketegasan dan menciptakan rasa keadilan dari pihak pemerintah kota dalam menyelesaikan status tanah warga yang tinggal di daerah bozem sebelum melakukan pemberdayaan lebih lanjut pada bozem. Hal ini dilakukan karena persoalan tanah ini kalau tidak diselesaikan lebih dahulu akan menjadi kendala atau penghalang proyek apapun di sekitar bozem.
2. Perlunya pembangunan yang berprinsip *Community Base Oriented* (CBS) artinya proyek apapun yang akan dilakukan sebagian besar bisa dirasakan manfaatnya oleh penduduk di sekitar bozem.

Dibiayai Oleh Dana DIPA PNBPU Universitas Airlangga Surabaya
Kontrak: Nomor : 688/JO3.2/PG/2005, Tanggal 5 Juli 2005

Kata kunci = Squatter Settlement ; pemberdayaan

SUMMARY

COMMUNITY OF SQUATTER SETTLEMENT EMPOWERMENT CASE STUDY ABOUT COMMUNITY IN BOZEM MOROKREMBANGAN SURABAYA

**Sudarso
(Sociology-FISIP Airlangga University, Surabaya)
(2005: 52)**

This Research problems are:(1) How Background socio-economic community around Bozem Morokrembangan City Of Surabaya? (2) How view socialize about existence Bozem Morokrembangan? (3)Problem-problem any kind of faced by community around Bozem Morokrembangan ?

This Research target are: (1) wishing to know characteristic sosio-ekonomi community around Bozem Morokrembangan in City Of Surabaya, (2) knowing and giving picture about settlement appearance history in Bozem, (3) giving and problem-problem view picture faced by all community in area Bozem Morokrembangan.

This Research have] descriptive type, because in its analysis will be laid open by some more empiric act picture emphasize at circumstantial information.

Population in this research [is] community which live in about Bozem Morokrembangan City Of Surabaya, where taken [by] 75 responder, technicsly [is] purposive sampling. As well as done by in-depth interview at] 5 one who own and the influence which enough signifikan in society [about Bozem Morokrembangan

Data in this research are collected by: (1) Holding an interview with responder by using kuesioner to entire/all responder. (2) Doing circumstantial interview with a few elite figure in their place environment omit.

Conclusion And result which got from research in] area Bozem Morokrembangan are]: (1)Penduduk Bozem Morokrembangan mostly represent all migran feel existence ketidakadilan care and [of] about land;ground status which they lived everyday. This matter can be seen from land;ground certificate publication. There are some community get certificate for their land;ground, while another cannot get the certificate. (2) Old Community live in area Bozem, feel important their] are existence control to

accretion sum up community in the area bozem. This Sinyalemen [is] proven [by] the tendency existence of all new migran take possession of wasteland which in fact the land;ground destined for the sake of bozem. (3) Overlap still its is institute which the sharing and holding responsible [at] management Bozem. This Matter is seen by a inexistence co-ordinate to usher bureaucracy institute, for example on duty the irrigating, governmental [of] province, Governmental of town start from on duty until chief of village. (4) environmental Correction of bozem expected by community can take place by kontinu and consistent. (5) Community hope enableness bozem do not leave especial target o] existence bozem that is lessen floods

From the fundamental finding, hence there are some recommendation which can on the market, that is (1). The importance of coherence and create sense of justice from governmental party [of] town in finishing citizen land;ground status which live in area bozem of before doing furthermore empowerment at bozem. This matter is conducted by because this land;ground problem is except that finished in advance will become any project barrier or constraint around bozem (2). The importance of principled development of Community Base Oriented (CBS) its mean, project to be conducted by most can be felt by its benefit by community around bozem.

Dibiayai Oleh Dana DIPA PNBP Universitas Airlangga Surabaya
Kontrak: Nomor : 688/JO3.2/PG/2005, Tanggal 5 Juli 2005

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur pada Allah SWT, selesailah laporan penelitian Bozem ini tepat pada waktunya. Penelitian yang lokasinya di Bozem Morokrengan Surabaya ini telah berjalan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan : (1) Ingin mengetahui karakteristik sosio-ekonomi penduduk di sekitar Bozem Morokrengan Di Kota Surabaya; (2) Ingin mengetahui dan memberikan gambaran tentang riwayat munculnya hunian di Bozem; (3) Ingin mengetahui seberapa jauh masyarakat merasa memiliki kepedulian pada Bozem Morokrengan; (4). Ingin memberikan gambaran problem-problem yang dihadapi para penduduk di daerah Bozem Morokrengan.

Laporan ini bisa selesai, tentunya berkat dukungan dari beberapa kalangan yang tidak bisa disebut satu per satu. Atas dukungannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Surabaya, November 2005

Peneliti

DAFTAR ISI

Lembar Identitas dan Pengesahan	i
Ringkasan dan Summary	ii-iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
I. Pendahuluan	3
II. Tinjauan Pustaka	6
III. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	19
IV. Metode Penelitian	20
V. Hasil dan Pembahasan	24
VI. Kesimpulan Dan Rekomendasi	55
Daftar Pustaka	60
Lampiran	

DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HAL
1	Umur Responden	24
2	Pendidikan Responden	25
3	Jenis Pekerjaan Responden	25
4	Rata-Rata Besar Penghasilan Keluarga Responden	26
5	Status Rumah Responden	26
6	Kondisi Rumah Responden	27
7	Lama Tinggal Di Bozem	47
8	Orang Yang Mengajak Responden Tinggal Di Daerah Bozem.....	47
9	Alasan tetap Tinggal Di Bozem	48
10	Problem-Problem Yang paling Merisaukan Responden.....	50
11	Pendapat Responden Tentang Keberadaan bozem.....	52
12	Kendala-Kendala Dalam Pemberdayaan Bozem	53

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Sekali pun di Surabaya dalam dua-tiga tahun terakhir telah terjadi berbagai perbaikan di bidang pembangunan sosial dan ekonomi. Tetapi, akibat imbas dari terjadinya kesenjangan antar wilayah dan arus urbanisasi yang berlebihan (*over urbanization*), harus diakui masih ada sejumlah masalah sosial yang belum dan sulit teratasi dengan segera. Aktivitas pembangunan yang hiper-pragmatis dan hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi serta kalkulasi efisiensi, ternyata terbukti gagal dan malah hanya meahirkan sejumlah kesenjangan —termasuk kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Chaniago, 2001). Sekali pun benar bahwa di era millenium urban ini banyak kemajuan telah berhasil dicapai kota-kota besar dan pusat-pusat pertumbuhan. Tetapi, dampak-dampak dari perubahannya tetap berawal dan berakhir di kota besar. Perubahan ini mempengaruhi struktur lapangan kerja, demografi, kualitas hidup, pengertian tentang bekerja, serta bersatunya persoalan-persoalan lokal, regional dan bahkan internasional.

Di berbagai kota besar, harus diakui bahwa perkembangan pesat pola kehidupan perkotaan acapkali tidak diimbangi dengan perkembangan kemampuan kota yang berarti. Bahkan beberapa di antaranya justru menurun, baik kualitas maupun kapasitasnya. Sebagai contoh, semakin besarnya derajat penderitaan kaum miskin di perkotaan karena mengalami



marginalitas ekonomi, sosial maupun akses budaya. Menajamnya masalah-masalah sosial perkotaan seperti konflik sosial, karakter kejahatan, prostitusi, anak jalanan dan endemiknya amuk massa yang menyerang rasa tertib umum. Relatif menurunnya usia produktif serta kelangkaan penyediaan lapangan kerja menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam pengelolaan kebijakan publik (Ahmad, 2002: 4).

Kegagalan pembangunan dan proses marginalisasi yang terjadi di wilayah pedesaan, bukan saja telah terbukti menimbulkan derasnya migrasi penduduk yang berlebihan di wilayah kota besar, tetapi juga setumpuk masalah sosial yang menyertainya. Seperti bisa kita lihat dalam lima tahun terakhir, kota-kota besar di Propinsi Jawa Timur —khususnya Surabaya— bukan saja diserbu arus migrasi yang terus meningkat dari waktu ke waktu, tetapi di saat yang sama juga memicu munculnya berbagai permasalahan kota, seperti permukiman kumuh, permukiman liar, gelandangan, pengemis, tuna wisma, dan lain-lain sebagainya.

Saat ini, dibandingkan Jakarta memang perkembangan dan tingkat kepadatan penduduk kota Surabaya masih tergolong jauh. Tetapi, tanda-tanda bahwa pada tahun-tahun mendatang Surabaya akan berkembang seperti Jakarta bukanlah sesuatu yang mustahil. Kalau di Jakarta pada tahun 2015 nanti, penduduk kota diramalkan bakal menjadi kota berpenduduk terbanyak nomor lima di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 21,2 juta jiwa —di bawah Tokyo (28,7 juta), Bombay (27,4 juta), Lagos (24,4 juta), dan Shanghai (23,4 juta), maka tidak mustahil jumlah penduduk kota Surabaya akan melonjak menjadi 4-5 juta jiwa.

Menurut T.G. McGee —seorang pakar perkotaan dari Universitas British Columbia— bersama-sama dengan Jakarta-Bandung dan Yogyakarta-Semarang, Surabaya-Malang akan berkembang menjadi kawasan mega-urban atau Extended Metropolitan Region, yakni sebuah kawasan perkotaan yang amat luas dengan jumlah penduduk besar, melebihi ukuran metropolitan. Ini berarti beban yang mesti ditanggung kota Surabaya bukan saja masalah-masalah internal akibat tekanan pertumbuhan penduduk asli atau persoalan pengaturan tata ruang dan penyediaan permukiman serta fasilitas publik bagi penduduk kota Surabaya sendiri, melainkan juga beban eksternal yang muncul akibat masuknya arus migran dari kota-kota menengah di sekitarnya, seperti Malang, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan, Jombang, dan bahkan daerah lain yang agak jauh seperti Bojonegoro, Lumajang, Madiun, dan sebagainya.

Menurut data yang ada, saat ini barangkali penduduk Surabaya hanya sekitar 2,6 juta. Tetapi, sebagai kawasan mega-urban, yang namanya jumlah penduduk riil dan berbagai masalah sosial yang ditimbulkannya sesungguhnya telah keluar dari batas-batas administratif wilayah kota. Penduduk di sekitar kawasan Surabaya —khususnya wilayah Gerbangkertasusila— yang secara administratif bukan termasuk penduduk Surabaya, jangan heran bila mereka sebagian bekerja, membelanjakan uang, dan hidup sebagai warga kota Surabaya. Bahkan, yang memprihatinkan, tidak sedikit pula mereka yang kemudian mengadu nasib menjadi migran liar dan masuk ke sektor informal, baik yang legal, informal, non-legal maupun yang ilegal.

Sebetulnya, sepanjang pemerintah kota Surabaya mampu memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi penduduk di kawasan mega-urban ini, barangkali sepesat apapun perkembangan kota dihela tidak akan menjadi masalah. Tetapi, lain soal ketika kemampuan pemerintah kota untuk menyediakan fasilitas publik dan melayani kebutuhan warganya yang senantiasa bertambah dengan pesat relatif tak berimbang. Di sejumlah kota besar di Indonesia, ketika dirasa arus pendatang yang masuk makin banyak, sementara kemampuan Pemerintah Kota sendiri relatif terbatas, maka gejala-gejala kejenuhan kota-kota ini pada akhirnya sempat menimbulkan gagasan dari sebagian ahli dan penata kota untuk membendung arus urbanisasi itu, atau setidaknya mengurangi, dan kalau perlu menutup kota tersebut dari para pendatang baru (Ahmad, 2002: 60).

Sekali pun banyak upaya dan peraturan telah dicoba diusahakan untuk menutup kota dari serbuan para pendatang tersebut. Tetapi rupanya gejala urbanisasi itu sedemikian kuatnya sehingga setiap usaha pengontrolan pada para pendatang maupun usaha penutupan kota akan sulit berhasil. Selama faktor-faktor pendorong dan penarik masih ada, dan selama tingkat kehidupan di kota masih sangat mencolok dibandingkan di desa, maka gejala perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari daerah-daerah minus ke daerah-daerah surplus, akan mengakibatkan ketidakseimbangan distribusi penduduk yang mengakibatkan konsentrasi-konsentrasi penduduk yang tinggi di daerah daerah tertentu atau lebih-lebih di kota-kota tertentu.

Belajar dari pengalaman dan sejarah perkembangan kota-kota besar di berbagai belahan dunia, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, kota-kota besar seperti Surabaya tak pelak membutuhkan pendekatan yang

lebih visioner serta melibatkan aliansi strategis dan kemitraan yang konstruktif dalam pola *win-win solution* dengan berbagai pihak. Tanpa adanya kerjasama yang adil, ruang partisipasi yang lebih luas serta demokrasi ekonomi yang berkelanjutan; kota kemenangan akan sulit terwujud. Perubahan tatanan ekonomi dan politik global serta akutnya persoalan megapolis di dunia ketiga, membutuhkan pendekatan yang baru, tata pemerintah baru, semangat kerja baru dan etika yang baru pula.

Untuk mencegah agar dampak urbanisasi dan pembangunan yang terus dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya, tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi penduduknya, seperti rencana program pemberdayaan bozem Morokembangan, diperlukan penyusunan rencana strategis dalam rangka meminimalisasikan dampak negatif yang timbul bagi penduduk yang sudah tinggal di sekitar Bozem Morokembangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah karakteristik sosio-ekonomi penduduk di sekitar Bozem Morokembangan Kodya Surabaya?
2. Bagaimana Riwayat munculnya hunian di sekitar Bozem Morokembangan tersebut?
3. Bagaimana pandangan masyarakat tentang keberadaan Bozem Morokembangan?
4. Problem-problem apa saja yang dihadapi penduduk di sekitar Bozem Morokembangan ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Michael P. Todaro(1989) menyebutkan bahwa motivasi seseorang untuk melakukan migrasi dari desa ke kota adalah motivasi ekonomi yang rasional, dimana upaya perpindahan dari desa ke kota yang dilakukan para migran mempunyai dua harapan, pertama, harapan untuk memperoleh pekerjaan dan yang kedua adalah harapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi daripada di daerah asal.

Diakui atau tidak selama ini pendekatan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, umumnya adalah dengan pendekatan ekonomi semata. Ada kesan kuat bahwa di mata pemerintah masalah kemiskinan sepertinya hanya dipahami sebagai sebuah persoalan kekurangan pendapatan.Sangat kelihatan pula di berbagai program yang dilakdsanakan pemerintah umumnya hanya berusaha memberikan bantuan di bidangpermodalan, memberikan subsidi atau semacamnya.(Suyanto, 1995).

Untuk jangka pendek, pemberian bantuan ekonomi itu bisa bermanfaat. Tetapi,untuk jangka panjang sesungguhnya pemberian bantuan ekonomi itu tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan secara tuntas, malahan muncul problem-problem yang menambah ruwetnya pengentasan kemiskinan. Bahkan menurut hasil penelitiannya Mubyarto (1995), tidak mustahil terjadi diperolehnya bantuan modal pinjaman kredit justru akan merupakan titik awal dari macam-macam masalah lain dan kehancuran usaha masyarakat miskin.

Menurut Korten dan Carner (1988), kekurangan pokok dari model-model pengentasan kemiskinan yang banyak di praktekkan di negara sedang berkembang—termasuk Indonesia—adalah bahwa mereka menjadi begitu memusatkan perhatian pada peningkatan kuantitas produksi atau hasil, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan rakyat. Banyak bukti menunjukkan bahwa di Indonesia paket-paket program pengentasan kemiskinan lebih berorientasi pada peningkatan produksi daripada bertujuan untuk mendistribusikan kesejahteraan.

1. Perangkap Kemiskinan

Menurut akar penyebab yang melatarbelakanginya, secara teoritis kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan/atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan bukan bahwa akan ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Mungkin saja dalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut akan terdapat perbedaan-perbedaan kekayaan, tetapi dampak perbedaan tersebut akan diperlunak atau dieliminasi oleh adanya pranata-pranata tradisional, seperti pola hubungan patron-client, jiwa gotong-royong, dan sejenisnya yang fungsional untuk meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial.

Kedua, kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan demikian sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan.

Kemiskinan buatan —dalam banyak hal— terjadi bukan karena seorang individu atau anggota keluarga malas bekerja atau karena mereka terus-menerus sakit. Berbeda dengan perspektif modernisasi yang cenderung memvonis kemiskinan bersumber dari lemahnya etos kerja, tidak dimilikinya etika wirausaha atau karena budaya yang tidak terbiasa dengan kerja keras, kemiskinan buatan dalam perbincangan di kalangan ilmuwan sosial acapkali diidentikkan dengan pengertian kemiskinan struktural. Menurut Selo Soemardjan (1980), yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Secara teoritis, kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku adalah sedemikian rupa keadaannya sehingga mereka yang termasuk ke dalam golongan miskin tampak tidak berdaya untuk mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki hidupnya. Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka ke dalam suasana kemiskinan secara turun-temurun selama bertahun-tahun. Sejalan dengan itu, mereka hanya

mungkin keluar dari penjara kemelaratan melalui suatu proses perubahan struktur yang mendasar.

Kemiskinan struktural, biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya. Mereka itu, walaupun merupakan mayoritas terbesar dari masyarakat, dalam realita tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya. Sedangkan minoritas kecil masyarakat yang kaya raya biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama segi ekonomi dan politik. Selama golongan kecil yang kaya raya itu masih menguasai berbagai kehidupan masyarakat, selama itu pula diperkirakan struktur sosial yang berlaku akan bertahan. Akibatnya terjadilah apa yang disebut dengan kemiskinan struktural.

Golongan yang menderita kemiskinan struktural itu, misalnya terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, atau kaum migran di kota yang bekerja di sektor informal dengan hasil yang tidak menentu sehingga pendapatannya tidak mencukupi untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Termasuk golongan miskin lain adalah kaum buruh, pedagang kaki lima, penghuni permukiman kumuh, pedagang asongan, dan lain-lain yang tidak terpelajar dan tidak terlatih, atau apa yang dengan kata asing disebut unskilled labour. Golongan miskin ini meliputi juga para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah —yang sekarang dapat dinamakan golongan ekonomi sangat lemah (Soedjatmoko, 1981: 46-61).

Ciri utama dari kemiskinan struktural ialah tidak terjadinya —kalaupun terjadi sifatnya lamban sekali— apa yang disebut sebagai mobilitas sosial vertikal. Mereka yang miskin akan tetap hidup dengan kemiskinannya, sedangkan yang kaya akan tetap menikmati kekayaannya. Mengapa bisa sampai begitu? Menurut pendekatan struktural, adalah terletak pada kungkungan struktural sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Umpamanya kelemahan ekonomi tidak memungkinkan mereka untuk memperoleh pendidikan yang berarti agar bisa melepaskan diri dari kemelaratan.

Ciri lain dari kemiskinan struktural adalah timbulnya ketergantungan yang kuat pihak si miskin terhadap kelas sosial-ekonomi di atasnya. Menurut Mohtar Mas'ud (1994: 143), adanya ketergantungan inilah yang selama ini berperan besar dalam memerosotkan kemampuan si miskin untuk bargaining dalam dunia hubungan sosial yang sudah timpang antara pemilik tanah dan penggarap, antara majikan dan buruh. Buruh tidak punya kemampuan untuk menetapkan upah, pedagang kecil tidak bisa mendapatkan harga yang layak atas barang yang mereka jual —pendek kata pihak yang miskin relatif tidak dapat berbuat banyak atas eksploitasi dan proses marginalisasi yang dialaminya karena mereka tidak memiliki alternatif pilihan untuk menentukan nasib ke arah yang lebih baik.

Pengertian dan definisi kemiskinan struktural, kendati menjadi alternatif konsep yang lebih disukai ilmuwan sosial. tetapi, kelebihan definisi seperti yang dikemukakan Selo Soemardjan di atas diakui atau tidak sesungguhnya

cenderung bersifat ideologis —dalam arti definisi di atas populer karena di sana ada semangat dan nilai-nilai yang menggugat kemapanan dan status quo. Secara konseptual, definisi kemiskinan yang dikemukakan Selo Soemardjan sedikit-banyak bersifat normatif. Parsudi Suparlan, misalnya, seorang antropolog yang menyunting kumpulan tulisan tentang kemiskinan di perkotaan, dengan lugas menyatakan bahwa definisi yang dikemukakan Selo Soemardjan kurang tajam dan tidak masuk akal (Suparlan, 1984: 14-15).

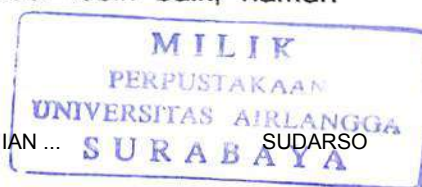
Definisi dan pengertian kemiskinan yang lebih lengkap —dalam arti sesuai dengan kenyataan dan secara konseptual jelas— dikemukakan oleh Robert Chambers (1987). Menurut Robert Chambers, inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Secara rinci, *deprivation trap* terdiri dari lima unsur, yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan atau kadar isolasi, (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan. Kelima unsur ini seringkali saling berkait satu dengan yang lain sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin.

Dari kelima dimensi di atas, kerentanan dan ketidakberdayaan perlu mendapat perhatian yang utama. Kerentanan, menurut Chambers dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam, kegagalan panen, atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga miskin itu. Kerentanan ini sering menimbulkan *poverty rackets* atau "roda penggerak kemiskinan" yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan asset produksinya sehingga mereka menjadi makin rentan dan tidak berdaya.

Ketidakberdayaan keluarga miskin salah satunya tercermin dalam kasus di mana elit desa dengan seenaknya memfungsikan diri sebagai oknum yang menjaring bantuan yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang miskin. Ketidakberdayaan keluarga miskin di kesempatan yang lain mungkin dimanifestasikan dalam hal seringnya keluarga miskin ditipu dan ditekan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Ketidakberdayaan sering pula mengakibatkan terjadinya bias bantuan terhadap si miskin kepada kelas di atasnya yang seharusnya tidak berhak memperoleh subsidi (Loekman Soetrisno, dalam: Dewanta dkk., 1995: 19-20).

Seseorang atau sebuah keluarga yang miskin acapkali mampu tetap survive dan bahkan bangkit kembali terutama bila mereka memiliki jaringan atau pranata sosial yang melindungi dan menyelamatkan. Tetapi, seseorang atau keluarga yang jatuh pada lingkaran setan atau perangkap kemiskinan, mereka umumnya sulit untuk bangkit kembali. Seseorang yang dibelit perangkap kemiskinan acapkali tidak bisa ikut menikmati hasil pembangunan dan justru menjadi korban pembangunan, rapuh, tidak atau sulit mengalami peningkatan kualitas kehidupan, dan bahkan acapkali justru mengalami penurunan kualitas kehidupan (Suyanto, 1996).

Secara empirik, banyak bukti memperlihatkan bahwa naiknya penduduk di atas garis kemiskinan tidak otomatis berarti penduduk tersebut hidupnya benar-benar bebas dari ancaman dan perangkap kemiskinan, melainkan penduduk tersebut sebenarnya hanya berpindah dari satu tahap kemiskinan yang terendah —yaitu tahap destitute— ke tahap apa yang disebut sebagai near poor. Dibandingkan dengan kelompok kemiskinan destitue, kelompok near poor hidupnya memang relatif lebih baik, namun



belum benar-benar stabil. Dalam arti bila sewaktu-waktu kelompok near poor ini menghadapi suatu krisis, maka dengan cepat kelompok near poor ini akan melorot lagi ke status destitute. Sebuah keluarga petani yang termasuk kelompok near poor tidak mustahil terpaksa turun kelas menjadi kelompok destitute bila tanpa diduga panen mereka tiba-tiba gagal karena serangan hama, karena serangan banjir, atau karena anjloknya harga jual di pasaran akibat ulah spekulasi gabah.

Dalam kenyataan bahkan acap terjadi, kelompok masyarakat yang termasuk cukupan atau kaya —bukan kelompok near poor— tiba-tiba harus mengalami penurunan status yang drastis, yakni masuk ke dalam kelompok "keluarga miskin baru". Jadi, berbeda dengan kesan dan pengumuman yang dikeluarkan pemerintah belakangan ini yang menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia senantiasa turun dari waktu ke waktu, dalam kenyataan justru tidak jarang terjadi penambahan jumlah orang miskin. Studi yang dilakukan Bagong Suyanto di sejumlah daerah di Jawa Timur menemukan bahwa kelompok masyarakat yang selama dua-tiga tahun terakhir terpaksa turun statusnya dari kelompok cukupan menjadi "keluarga miskin baru" adalah kelompok petani cengkeh dan petani garam (Suyanto, 1996). Studi yang dilakukan Bagong Suyanto tersebut, walau dengan jumlah sampel yang terbatas, namun membuktikan bahwa usaha untuk memberantas kemiskinan memang bukan hal yang mudah, sebab apa yang dialami keluarga dan masyarakat miskin bukan sekedar kekurangan pendapatan atau tidak dimilikinya modal usaha saja, tetapi lebih dari itu yang sesungguhnya membelenggu keluarga dan masyarakat miskin adalah apa yang disebut

Robert Chambers dengan istilah perangkap kemiskinan atau lingkaran setan kemiskinan.

2. Ciri-Ciri Kemiskinan

Secara umum yang termasuk penduduk atau keluarga miskin, selain ditandai dengan keterbatasan pendapatan dan modal usaha, mereka biasanya juga memiliki keterbatasan dalam mengakses berbagai sarana kebutuhan dasar. Secara lebih rinci, beberapa ciri dari penduduk atau keluarga miskin adalah:

Pertama, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti: tanah yang cukup, modal ataupun ketrampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.

Kedua, mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh assets produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. Sementara mereka pun tidak memiliki syarat untuk terpenuhinya kredit perbankan, seperti jaminan kredit dan lain-lain, yang mengakibatkan mereka berpaling ke lintah darat yang biasanya untuk pelunasannya meminta syarat-syarat berat dan bunga yang amat tinggi.

Ketiga, tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat Sekolah Dasar. Waktu mereka umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian juga

dengan anak-anak mereka, tak dapat menyelesaikan sekolahnya oleh karena harus membantu orang tuanya mencari nafkah tambahan.

Keempat, banyak di antara mereka yang tinggal di daerah pedesaan, dan tidak mempunyai tanah garapan, atau kalau pun ada relatif kecil sekali. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian.. tetapi, karena bekerja di pertanian berdasarkan musiman, maka kesinambungan pekerjaan mereka menjadi kurang terjamin. Banyak di antara mereka lalu menjadi pekerja bebas (*self employed*) yang berusaha apa saja. Akibat di dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mendorong mereka selalu hidup di bawah garis kemiskinan. Didorong oleh kesulitan hidup di desa, maka banyak di antara mereka mencoba berusaha ke kota (*urbanisasi*) untuk mengadu nasib.

Kelima, banyak di antara mereka yang hidup di kota masih berusaha muda dan tidak mempunyai ketrampilan atau *skill* dan pendidikan. Sedangkan kota sendiri terutama di negara sedang berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa itu. Apabila di negara maju pertumbuhan industri menyertai urbanisasi dan pertumbuhan kota sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka proses urbanisasi di negara sedang berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga kerja dalam perkembangan industri. Bahkan, sebaliknya, perkembangan teknologi di kota-kota negara sedang berkembang justru menampik penyerapan tenaga kerja, sehingga penduduk miskin yang pindah ke kota terdampak dalam kantong-kantong kemelaratan (*slumps*).

3. Perubahan Sosial

Proses perubahan masyarakat yang karena adanya—seperti modernisasi dan industrialisasi—bukan Cuma menyebabkan terjadinya kesenjangan dan polarisasi sosial, tetapi juga menyebabkan masyarakat lokal seolah teralienasi dari proses perubahan sosial yang dialami dan terjadi di wilayahnya. Diakui atau tidak, selama ini, yang namanya kepentingan pemilik modal umumnya mereka lebih banyak berorientasi kepada negara—melayani penguasa melalui pola hubungan bisnis yang mengandalkan patronase—dan sebaliknya acapkali kurang mengabaikan kepentingan masyarakat lokal, dan bahkan ditengarai justru malah merampasi hak-hak adat masyarakat lokal, sehingga bisa dimaklumi jika kemudian terjadilah apa yang disebut cultural counter movement maupun aksi-aksi protes yang sifatnya terbuka. Jadi proses perubahan dan industrialisasi yang menafikan keberadaan komunitas lokal, dan cenderung lebih banyak terekspresi sebagai proses transplantasi daripada sebagai proses transformasi niscaya akan melahirkan ketegangan sosial, bersifat a-historis dan merugikan penduduk lokal (Suyanto, 2002).

4. Pemberdayaan Berbasis Masyarakat

Pemberdayaan merupakan konsep yang muncul sekitar tahun 70-an, dimulai perkembangan dari daratan Eropa yang lebih umum dikenal dengan istilah Empowerment. Konsep Empowerment Eropa modern pada hakekatnya merupakan aksi emansipasi dan liberalisasi manusia dari totaliterisme keagamaan. Emansipasi dan liberalisasi serta penataan terhadap segala kekuasaan dan penguasaan inilah yang kemudian menjadi substansi

pemberdayaan (Priyono dan Pranarka, 1996:44-46). Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *people centered, participatory, empowering, dan sustainable*.

Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus atau *breakdown* dari hubungan antara subyek dengan obyek. Proses ini mementingkan pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirnya daya dari subyek ke obyek. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek (yang baru), sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antar subyek dengan subyek lain. Pemberdayaan, menurut Indrasari Tjandraningsih (1996), mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya.

Konsep pemberdayaan, menurut Gunawan Sumodiningrat (1987), dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkemajuan. Kedua, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya dimiliki masyarakat. Ketiga, Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

Jadi Substansi pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Secara lebih rinci, dimensi-dimensi dari pemberdayaan, bukan saja menyangkut upaya

merubah kognisi, menumbuhkan keinginan seseorang untuk mengaktualisasikan diri, dan memberikan pengalaman psikologis yang membuat seseorang merasa berdaya. Tetapi juga mengangkut pada usaha memampukan masyarakat miskin melakukan mobilitas ke atas, menumbuhkan perilaku masyarakat miskin agar mereka mandiri dan produktif dalam memenuhi kebutuhan hidup, berorientasi pada kesetaraan, dan membutuhkan iklim demokrasi yang benar-benar menjamin hak masyarakat miskin dari kemungkinan intervensi pihak-pihak yang berkuasa. (Suyanto, 2002)

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

III.1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Ingin mengetahui karakteristik sosio-ekonomi penduduk di sekitar Bozem Morokrengan Di Kota Surabaya**
- 2. Ingin mengetahui dan memberikan gambaran tentang riwayat munculnya hunian di Bozem**
- 3. Ingin mengetahui seberapa jauh masyarakat merasa memiliki kepedulian pada Bozem Morokrengan.**
- 4. ingin memberikan gambaran problem-problem yang dihadapi para penduduk di daerah Bozem Morokrengan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakatnya.**

III. 2. Manfaat yang paling utama dari hasil penelitian ini adalah:

- 1. Berguna bagi pemerintah kota Surabaya dalam membuat kebijakan untuk menangani pemukiman liar.**
- 2. Berguna bagi para mahasiswa dan komunitas kampus untuk lebih memahami fenomena kemiskinan perkotaan, terutama mengenai pemukiman liar.**

BAB IV .

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian pemukiman liar ini merupakan penelitian deskriptif yang memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai karakteristik sosial ekonomi. Penelitian model survai ini dilakukan dengan alasan bahwa persoalan pemukim liar jarang dilakukan penelitian secara khusus, oleh karena itu agar mendapatkan informasi yang lebih pas dan signifikan, maka sebagai tahap awal, diperlukan lebih dahulu perolehan informasi yang sifatnya makro, yaitu memperoleh gambaran yang lebih banyak tentang karakteristik sosial-ekonomi pemukim liar. Jadi survai dalam penelitian ini tidak sampai pada taraf untuk menguji atau membuktikan hipotesis, tetapi lebih pada memperoleh gambaran awal yang sifatnya lebih luas (makro) tentang proses terjadinya pemukiman liar. Untuk menunjang gambaran yang makro tersebut, tampilan data dalam bentuk tabel frekuensi akan banyak ditemui. Kajian yang perlu didalami dan sifat datanya lebih kualitatif diambil dari kutipan hasil wawancara mendalam.

2. Lokasi penelitian

Penelitian pemukim liar ini memilih daerah Bozem Morokrembangan, karena merupakan daerah yang cukup luas adanya pemukim liar dan sudah ada lebih dari 10 tahun.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian yang menjadi populasinya adalah pemukim liar yang tinggal di daerah Bozem Morokrembangan. Jumlah sampel yang diambil adalah 75 pemukim liar, dengan pertimbangan bahwa dengan jumlah tersebut akan diperoleh gambaran keadaan pemukim liar yang memadai, dan dimungkinkan ditemukannya banyak variasi tentang karakteristik dan interaksi sosial di daerah Bozem tersebut.

Disamping itu juga diambil 5 nara sumber terpilih, yaitu: Ibu Liana, Bapak Amrullah, Bapak Agus, Bapak Eddy Kristiantoro, dan Ibu Suprapmi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian pemukiman liar ini berasal dari dua jenis data, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan cara: Pertama, melakukan wawancara dengan menggunakan seperangkat kuesioner untuk mendapatkan gambaran umum tentang pemukim liar. Di kuesioner sebagian besar merupakan pertanyaan yang tertutup, yaitu sudah disediakan alternatif jawaban. Sementara sisanya ada yang semi terbuka dan terbuka. Pemilihan kuesioner tersebut untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola-pola dalam variabel yang berkaitan dengan karakteristik sosial ekonomi pemukim liar. Kedua, wawancara secara mendalam pada pemukim liar dengan menggunakan seperangkat pedoman wawancara. Observasi secara langsung tentang keadaan pemukim liar di rumahnya masing-masing juga akan dilakukan.

Wawancara secara mendalam dilakukan pada warga yang dipilih secara sengaja, yaitu pemukim liar yang tergolong sudah cukup lama atau

aktif dalam kegiatan kampung. Dalam penelitian ini ada 5 pemukim liar yang diwawancarai secara mendalam.

Sementara data sekunder diperoleh dari pihak Laporan Penelitian, jurnal, artikel, Biro Pusat Statistik (BPS) dan Kelurahan

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis dalam penelitian ini, ada dua tahap yang dilakukan, yaitu: Pertama, data yang diperoleh dari wawancara yang menggunakan kuesioner, akan mendapatkan data yang lebih merupakan gambaran umum tentang perlawanan. Dalam tahap ini lebih banyak menganalisis data-data kuantitatif, dalam bentuk interpretasi data dari tabel frekuensi, untuk mengetahui penyebaran data dan tabel silang yang melihat kecenderungan hubungan dan perbandingan antar dua variabel. Kedua, Dari gambaran umum tersebut kemudian dilakukan pemilahan atau klasifikasi, dan diperoleh klasifikasi seperti kasus-kasus pemukim liar. Tahap kedua ini lebih banyak menganalisis data-data kualitatif.

Sebagai acuan analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan metode yang digunakan oleh Miles dan Hubberman, (1992:16-20) bahwa dalam analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun hasil-hasil wawancara yang ada. Adapun penyajian data adalah sekumpulan

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penelitian pemukim liar ini juga mempertimbangkan suatu kriteria tentang persoalan validitasnya. Untuk mencapai maksud tersebut maka dipergunakan tehnik triangulasi, yaitu, memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini digunakan model triangulasi Denzin,(1991: 178) yang memanfaatkan sumber, metode penyelidikan dan teori.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data dari hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan perspektif informan dan perspektif yang lain mengenai hal yang sama.

Triangulasi penyelidikan dilakukan dengan diskusi-diskusi dengan orang-orang yang berada di luar struktur perkebunan tembakau. Disamping itu di telaah penelitian sebelumnya pernah dilakukan di lokasi yang sama dengan masalah yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber data dari pengamat lain

Triangulasi teori dilakukan dengan mencari tema pembanding setelah menguraikan pola, hubungan dan penjelasan yang muncul dari analisis. Setelah kegiatan triangulasi ini dilakukan diharapkan interpretasi data akan mampu menjawab permasalahan yang ada dan akhirnya kesimpulan yang diperolehpun akan sesuai dengan tujuan penelitian pemukim liar ini.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1. KARAKTERISTIK SOSIAL-EKONOMI

V.1.1. Responden

Dalam penelitian ini diperoleh data tentang usia responden tergolong dalam usia yang produktif, yaitu berkisar anatar umur 19 tahun sampai 55 tahun, dimana sekitar 36 persen responden berumur 28-36 tahun, dan 28 persen berumur 37-45 tahun, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1
Umur Responden

Kategori Umur	Frekuensi	Persentase
19-27	15	20,0
28-36	27	36,0
37-45	21	28,0
46-55	12	16,0
Jumlah	75	100,0

Sumber: Kuesioner no.2

Sementara itu pendidikan terakhirnya menunjukkan bahwa hampir separo dari responden pendidikannya lulusan SMU. Dari tingkat pendidikan ini menunjukkan bahwa warga sekitar bozem, jika diukur dari ketersediaan sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, jelas masih tergolong rendah pendidikannya. Namun kenyataan ini terjadi, karena banyak warga bozem itu merupakan para migran yang berasalh dari Lamongan dan daerah Madurayang mengadu nasib di kota, dan memang kebanyakan para migran tersebut tingkat pendidikannya tergolong rendah. Para migran tersebut umumnya mengadu nasib ke kota tidak mengutamakan ijazah formal, tetapi lebih menggantungkan nasib pada pekerjaan di sektor informal yang jelas tidak memerlukan pendidikan yang tinggi.

Tabel 2
Pendidikan Responden

Kategori Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SD tidak tamat	4	5.3
Tamat SD	6	8.0
SLTP tidak tamat	4	5.3
Tamat SLTP	17	22.7
SMU tidak tamat	8	10.7
Tamat SMU	35	46.7
Diploma/Akademi/PT	1	1.3
Jumlah	75	100.0

Sumber: Kuesioner no. 6

Dominasi pekerjaan masih mengumpul pada pekerjaan sektor informal yaitu ada sekitar 41,3 persen responden. Cukup banyaknya masyarakat yang menggeluti sektor informal, bisa dipahami karena untuk memasuki sektor informal tidak perlu menggunakan ijazah atau persyaratan formal lainnya.

Tabel 3
Jenis Pekerjaan Responden

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Buruh bangunan	4	5.4
Buruh industri	9	12.0
Pedagang	12	16.0
PNS/ABRI	7	9.3
Sektor industri kecil	12	16.0
Sektor informal lainnya.	31	41.3
Jumlah	75	100.0

Sumber: Kuesioner no.7

Penghasilan rumah tangga yang menjadi sample penelitian ini separonya berpenghasilan 500.000 sampai 1 juta, bahkan ada yang mengaku rata-rata penghasilan per bulan rumah tangganya bisa mencapai di atas 1 juta rupiah, hal ini diakui oleh sekitar 28 persen responden.

Tabel 4
Rata-rata Besar Penghasilan (per bulan) Keluarga Responden

Besar penghasilan	Frekuensi	Persentase
Dibawah Rp. 250.000,00	1	1.3
Antara Rp. 250.000,00 sampai Rp. 500.000,00	12	16.0
Antara Rp. 500.00,00 sampai Rp. 1 juta	41	54.7
Diatas satu juta rupiah	21	28.0
Jumlah	75	100.0

Sumber: Kuesioner no.13

Sementara itu sekitar 81 persen responden berterusterang kalau mereka berada di tanah negara. Namun menarik untuk dipertanyakan adalah ada sekitar 4 persen responden sudah mengantongi sertifikat hak milik.

Tabel 5
Status Rumah Responden

Jenis status	Frekuensi	Persentase
Hak milik	3	4.0
Sewa/kontrak	10	13.3
Tanah negara	61	81.3
Lainnya.	1	1.3
Jumlah	75	100.0

Sumber: Kuesioner no.12

Status tanah negara yang ditempati warga bozem, tidak membuat mereka ragu untuk membuat rumah yang tergolong permanen dan kualitasnya cukup baik. Seperti yang terungkap dalam penelitian ini. Rumahnya memang tergolong ukurannya kecil, rata-rata dibawah 100 meter persegi, namun sebagian besar (86,7 persen) dindingnya sudah tembok, lantainya sudah bertegel dan berkeramik, dan atapnya hampir semuanya sudah memakai genting.

Tabel 6
Kondisi Rumah Responden

Jenis status	Frekuensi	Persentase
Luas:		
1. Dibawah 50 meter persegi	26	34,7
2. Antara 50-100 meter persegi	44	58,7
3. Diatas 100 meter persegi	5	6,6
Jumlah	75	100,0
Dinding:		
Tembok	65	86,7
Semi tembok	7	9,3
Papan	3	4,0
Jumlah	75	100,0
Lantai:		
Semen	23	30,7
Tegel biasa	30	40,0
Keramik	22	29,3
Jumlah	75	100,0
Atap:		
Seng	4	5,3
Genting	71	94,7
Jumlah	75	100,0

Sumber: Kuesioner no. 11

Dengan keadaan semakin besarnya prosentase penduduk yang memiliki rumah yang permanen—bahkan ada beberapa yang sudah bertingkat, maka pembenahan lingkungan bozem akan menjadi tidak mudah, bukan hanya memerlukan pembiayaan yang besar apabila sampai ada pengurusan, tetapi juga perlu waktu yang lama, karena penduduk seolah-olah sudah ada ikatan emosional dengan tanah dan lingkungan bozem morokreimbangan.

V.1.2. Profil Nara Sumber.

.1. Ibu Liana (Ny Kasminto)/PKK/Istri mantan RT

Ibu Liana adalah seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya dihabiskan untuk menjaga toko miliknya. Selain itu di usianya yang menginjak 45 tahun ibu Liana aktif dalam segala kegiatan sosial di wilayah bozem Morokrembangan, mulai dari kegiatan RT/RW, pengajian dan PKK. Ibu Liana mengakui bahwa melalui kegiatan PKK-lah beliau mendapat banyak pengetahuan mulai dari obatan-obatan tradisional, pelatihan ketrampilan dan sebagainya. Tidak jarang ibu Liana sering mewakili RT/RW, kelurahan bahkan sampai pada tingkat kecamatan untuk mengikuti lomba PKK dan diundang menghadiri berbagai seminar tentang kesehatan masyarakat dan masalah kekerasan anak. Semua pengetahuan yang telah didapatkan oleh ibu Liana selalu ditularkan kepada ibu-ibu yang lain seperti pemberantasan nyamuk demam berdarah dan cara-cara penanganannya. Banyak tetangga ibu Liana yang datang untuk bertanya dan meminta tanaman toga untuk keluarganya yang sakit. Menurut pendapat ibu Liana memanfaatkan tanaman toga atau obat-obatan tradisional sangatlah membantu apabila ada keluarga yang sakit padahal kita tidak mempunyai cukup uang ke dokter. Keaktifan ibu Liana dalam kegiatan PKK ini tidak lepas dari peran suaminya yaitu bapak Kasminto. Beberapa tahun lalu bapak Kasminto menjabat sebagai ketua RT selama 13 tahun, kemudian mengundurkan diri karena harus memberi kesempatan kepada yang muda. Bapak kasminto bekerja sebagai pegawai honorer Pemkot yang berpenghasilan diatas satu juta rupiah perbulan.

Keluarga ibu Liana dan bapak Kasminto dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama mereka adalah laki-laki dan sudah bekerja, sedangkan anak kedua adalah perempuan yang masih duduk dikelas tiga SMP negeri. Menurut cerita ibu Liana, awalnya yang mengajak beliau sekeluarga tinggal di bozem adalah saudaranya yang lebih dulu tinggal di daerah bozem. Keluarga ini menempati rumah ukuran 7,5 x 5,5 meter. Dengan kondisi bangunan tembok berlantaikan keramik dan beratap genting selain itu rumahnya juga bertingkat. Fasilitas yang ada dirumah ibu Liana hanya sebatas listrik, air dan telepon. Tentang status kepemilikan tanah ibu Liana mengakui bahwa tanah ini hanya milik negara dan beliau hanya mengantongi surat HGB (Hak Guna Bangunan). Meski hampir semua penduduk bozem tidak mengantongi surat bukti kepemilikan tanah menurut ibu Liana ada tetangga yang sudah memiliki tapi beliau mengakui tidak tahu menahu cara mengurus surat tersebut dan itu tidak membuat ibu Liana tidak bberkecil hati. Ibu Liana menjelaskan bahwa pengeluarannya hanya meliputi pembayaran rekning listrik,air, telepon, PBB, dan biaya pendidikan dan kursus tari untuk putrinya. Keterjangkauan fasilitas umum dengan lokasi tempat tinggal ibu Liana sudah lengkap hanya kekurangannya pada fasilitas kesehatan seperti puskesmas ataupun klinik. Sebagai seorang ibu rumah tangga ibu Liana dituntut untuk selalu menjaga dan berhati-hati dalam mengelola uang, oleh karena itu beliau mengaku tidak pernah mengalami kesulitan keuangan karena kehati-hatiannya dalam mengelola keuangan. Menurut pendapat ibu Liana problem yang paling merisaukan dirinya adalah banjir yang tiap tahun selalu datang apalagi untuk 3 tahun terakhir ini.

Sebagai seorang penduduk yang tinggal selama kurang lebih 22 tahun, ibu Liana mengaku mengerti asal usul bozem Morokrengan. Awalnya bozem ini adalah laut yang berbentuk rawa-rawa. Oleh penduduk sekitar sempat dimanfaatkan sebagai tambak, yang pada akhirnya berubah fungsi menjadi bozem. Menurut ibu Liana, dahulu jalan yang beraspal itu adalah pemukiman yang padat. Pada tahun 1984 dibongkar dan digusur oleh pemerintah kalau tidak salah dari dinas pengairan. Bangunan yang digusur itu sendiri terletak di bibir bozem kurang lebih 3 meteran. Penduduk yang rumahnya digusur mendapat ganti rugi meskipun sedikit karena hanya dihitung dari nilai bangunan, tetapi bentuk ganti rugi tidak hanya berupa uang melainkan ada yang berupa rumah sederhana meski tidak semuanya. Jalan yang dibangun ini dimaksudkan agar Dinas pengairan lebih mudah mengontrol bozem, tetapi dalam prakteknya sepertinya malah jalan itu dibuat untuk memudahkan penduduk sekitar bozem berlalu-lalang dan memanfaatkan lahan sisa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan yang terletak dipinggir jalan ataupun diatas got. Sebelum ada bangunan tersebut lahan sisa tersebut sempat diberi pagar berduri tapi dalam perkembangannya malah pagar tersebut akhirnya dirobohkan dan dijadikan rumah atau persisnya rumah satu petak. Pembangunan rumah-rumah tersebut menurut ibu Liana tidak memerlukan izin secara formal atau khusus seperti HGB (Hak Guna Bangunan). Hanya saja dulunya memang baru satu orang yang membangun kemudian banyak warga yang menganggap kok tidak ada teguran dari warga lain khususnya RT/RW ataupun dari aparat pemerintah itu sendiri, sehingga warga menganggap hal itu bukan masalah jadi sah-sah saja membangun.

2. BAPAK AMRULLAH (Wiraswasta/mantan RT)

Bapak Amrullah sudah tinggal di daerah bozem Morokrengan selama 17 tahun. Meskipun hanya mengontrak tetapi beliau pernah dipercaya menjabat sebagai ketua RT. Di usianya yang menginjak 49 tahun bapak Amrullah bekerja sebagai pedagang, setiap 2 bulan sekali beliau pergi ke Kalimantan untuk mengirim barang sekaligus menjenguk anaknya. Bapak Amrullah dikaruniai 5 orang anak, ketiga anaknya sudah menikah dan tinggal di Kalimantan. Memang bapak Amrullah bukan orang asli Surabaya tetapi asli Kalimantan hanya istrinya yang orang Surabaya asli dan tinggal di daerah bozem. sejak masih bujangan bapak Amrullah sudah merantau ke Surabaya tepatnya sudah 34 tahun. Dulu waktu bapak Amrullah pertama kali tinggal di Surabaya daerah bozem Moro Krengan belum sepadat sekarang. Sebelum jembatan tol dibangun pemukiman penduduk sampai pinggir bozem kemudian disuruh pindah dan diberi ganti rugi.penggusuran dilakukan karena ada pembangunan jalan tol. Seharusnya sampai saat ini ada patok yang membatasi mana yang boleh ditempati atau dibangun dan mana yang tidak boleh, karena selama ini baik orang-orang lama yang pernah digusur maupun pendatang terus-menerus menempati lahan kosong itu.

Bozem di wilayah tempat tinggal bapak Amrullah memang jauh berbeda dengan tempat tinggal ibu Liana. Bozem ditempat tinggal bapak Amrullah jauh lebih bersih, hal ini terjadi karena wilayah bozem yang berseberangan dengan markas Angkatan Laut (AL) Bumimoro. Baru-baru ini pihak AL mempunyai acara lomba dayung yang menggunakan bozem Moro Krengan sebagai tempat lomba, sehingga mau tidak mau pihak AL harus mengadakan pembersihan masal daerah bozem. Sebelumnya ada

penghadang sampah yang berfungsi agar sampah atau enceng gondok tidak masuk di bozem sekitar AL, hal ini mengakibatkan sampah yang menumpuk bahkan sampai menjadi tanah. Tentu saja hal ini sangat mengganggu penduduk sekitar bahkan kalau petang menjelang penduduk sering mengeluhkan banyak nyamuk dan bau tidak sedap dari tumpukan sampah tersebut. Banyak penduduk yang resah dengan kesehatannya, akhirnya dijebol dan di keruk oleh pihak AL sendiri. Sampai saat ini air sudah dapat mengalir sendiri dan terlihat lebih rapi atau bersih meski bau air belum bisa hilang.

Untuk saat ini menurut bapak Amrullah bozem itu sendiri tidak bisa berfungsi secara maksimal. Kenyataannya kalau hujan meskipun cuma 15 menit air itu meluap kerumah-rumah penduduk jadi bozem sudah tidak mampu lagi menampung air. Padahal bozem Moro Krembangan seharusnya sebagai tempat penampungan air terbesar dari kota dan diharapkan dapat menampung air yang masuk ke kota. Jika bozem sudah tidak dapat menampung lagi berarti kota harus siap-siap terkena banjir, seperti penduduk sekitar bozem yang selalu siap siaga jika hujan turun. Pernah rumah yang letaknya dibelakang rumah bapak Amrullah terkena banjir sampai setinggi jendela. Biasanya gang atau rumah yang selalu menjadi langganan banjir adalah di gang 1 dan 2 tepatnya di jalan Gadukan Timur gang 1 dan 2. Yang menakutkan jika hujan deras dan air laut pasang banjir akan lebih parah lagi karena jika air laut pasang air laut masuk kedalam atau meluap, kalau sudah begitu bozem tidak dapat menampung air dari laut maupun air hujan banjir besarpun tidak dapat dielakkan lagi. Sebelumnya bapak Amrullah tinggal di gang tersebut karena selama beberapa tahun terakhir ini selalu banjir dan

banjirnya tidak tanggung-tanggung, sehingga beliau memilih pindah ke tempat yang lebih aman dari banjir. Bapak Amrullah sebenarnya belum membuktikan apakah rumah yang beliau tempati bebas banjir atau tidak karena beliau baru 8 bulan tinggal disini. Jika dilihat dari bangunannya memang rumah yang ditempati bapak Amrullah jauh lebih tinggi dari rumah-rumah disampingnya.

Menurut pengakuan bapak Amrullah dulu jika ada banjir tidak pernah separah akhir-akhir ini. Hal ini terjadi kemungkinan karena banyaknya bangunan liar yang telah berdiri. Jika dirunut bangunan atau pemukiman liar tersebut memang bukan daerah bozem tapi aliran sungai tepatnya saluran air untuk ke arah bozem. Sebenarnya pemukiman tersebut sudah dibeli oleh dinas pengairan tetapi dibiarkan kosong, karena penduduk yang selalu berkembang dan membutuhkan tempat tinggal tanah tersebut dimanfaatkan oleh beberapa orang dan dikapling-kapling. Yang membuat bapak Amrullah tidak habis pikir adalah sikap dari pihak dinas pengairan yang seolah-olah tidak mau tahu, mestinya mereka mengambil tindakan atau minimal mengantisipasi agar kejadian ini tidak menyulitkan untuk beberapa waktu mendatang. Sikap pasif dari pihak dinas pengairan yang terkesan membiarkan kejadian tersebut banyak disesalkan oleh masyarakat sekitar khususnya yang terkena banjir. Banyak masyarakat yang menilai atau bertanya-tanya kenapa sewaktu masih sedikit yang membangun tidak diperingatkan ataukah harus menunggu sampai penuh kemudian digusur, bukankan hal tersebut lebih menyulitkan proses pengusuran nantinya.

Daerah pemukiman bozem ini kebanyakan masyarakat urban atau pendatang terutama dari daerah Lamongan dan keturunan orang Madura. Hal

ini diakui oleh bapak Amrullah, meskipun banyak pendatang tidak pernah ada konflik atau masalah besar yang samapi pada taraf tawuran atau "gontok-gontok-an". Awalnya memang pernah terjadi sedikit kesalahpahaman antara pengurus karang taruna dengan orang yang mengkapling tanah kosong atau bangunan liar tersebut, yaitu masalah lapangan bola yang sering dipakai oleh anak karang taruna yang tiba-tiba dipatok-patok oleh orang-orang tersebut. Masalah itu dapat diselesaikan secara damai ditingkat RT dan RW. Jalan keluarnya adalah pihak karang taruna mengalah dan mencari lapangan baru dengan cara menyewa. Kegiatan karang taruna di RT/RW bapak Amrullah memang terkenal bagus dan kompak. Hal itu selalu diakui oleh responden yang peneliti wawancarai.

Bapak Amrullah berharap meskipun penduduk baru yang tinggal di pemukiman liar tersebut tidak diakui dan tidak diperbolehkan masuk sebagai warga di RT, beliau menghendaki tidak terjadi pertentangan atau penolakan dari penduduk lama karena hanya masalah administrasi kependudukan saja. Bapak Amrullah juga menyarankan sebaiknya antara penduduk lama dan baru bisa saling menjaga kerukunan. Memang diakui dari pihak kelurahan maupun kecamatan tidak memperbolehkan penduduk pemukiman liar itu masuk ke RT hal ini terjadi bukan semata-mata untuk menghambat laju urbanisasi tapi karena terbentur masalah peraturan atau UU yang tidak mengijinkan penduduk tinggal di saluran air. Selama menjabat sebagai ketua RT bapak Amrullah banyak sekali menerima permintaan dari penduduk pemukiman baru, agar dapat mengurus KTP atau surat penting lainnya tapi ditolak karena terbentur masalah peraturan tersebut. Meski mendapat

penolakan tetapi penduduk baru tersebut bisa menerima dan menyadari kekurangannya.

Jika terjadi masalah atau konflik biasanya yang menjadi mediator atau penengah adalah pengurus RT terutama ketua RT. Peran sesepuh atau tokoh masyarakat tidak maksimal karena kebanyakan masyarakat lebih melihat atau menganggap hal tersebut tugas pengurus RT. Hal tersebut berlaku untuk hubungan antara warga dengan aparat pemerintahan (kelurahan dan kecamatan). Setiap tahunnya pihak Kelurahan terutama Lurah, turun langsung ke warga untuk mengadakan Bina Wilayah yang diadakan setiap peringatan Agustusan. Semua RW dan RT diwajibkan mengikuti Bina Wilayah, Bina Wilayah di sini adalah kegiatan penilaian kampung meliputi kebersihan, kerapian dan kegiatan PKK misalnya program-program posyandu, KB, dan ketrampilan. Selain itu kegiatan rutin yang telah dilakukan oleh RT/RW juga dinilai karena akan dilihat mana yang programnya telah berhasil dan mana yang belum tepat sasaran. Hal ini juga meliputi kegiatan keamanan kampung, ada tidaknya ronda dan alat-alat pemadam kebakaran. Banyak pihak yang turut mendukung kegiatan Bina Wilayah ini yaitu dari pihak polsek dan puskesmas. Melalui kegiatan ini sama sekali tidak terlihat ada jarak antar warga dan aparat pemerintah khususnya kelurahan. Kerukunan seperti ini diharapkan selalu ada oleh karena itu bapak Amrullah berharap program ini selalu diadakan. Selain untuk menjaga kerukunan kegiatan tersebut juga bermanfaat untuk memacu RT-RT atau RW untuk berprestasi dan memperbaiki wilayahnya, minimal membersihkan lingkungan bozem.

Menurut bapak Amrullah sebagian besar penduduk sekitar bozem adalah penduduk asli daerah Lamongan dan Gresik, kebanyakan dari mereka sudah puluhan tahun tinggal disini, oleh karena itu hampir semua anak-cucu mereka mengaku penduduk asli Surabaya. Untuk penduduk baru memang rata-rata adalah penduduk Lamongan keturunan Madura ataupun penduduk asli Madura. Jenis mata pencaharian penduduk di bozem Moro Krembangan sangat heterogen, mulai dari penjual jasa, pedagang, buruh ataupun karyawan pabrik. Hanya saja sangat sedikit untuk pegawai negeri sipil ataupun dari ABRI, kemungkinan jika bekerja sebagai PNS ataupun ABRI hanya honorer. Bapak Amrullah juga sedikit mengamati karakteristik penduduk pemukiman baru, yang menurut beliau penanganannya lebih sulit dari penduduk lama. Hal ini terjadi karena sebagian penduduk baru tersebut sering pindah-pindah alias tidak menetap, bisa dilihat dari banyaknya kos-kosan atau rumah-rumah yang dikontrakan. Tingkat mobilitas yang tinggi seperti ini sangat menyulitkan untuk mengontrol apalagi mengatur karena tidak adanya ikatan emosional antar tetangga. Jika dibandingkan dengan karakter penduduk lama memang jauh sekali, karena sedikit sekali orang yang masuk atau pindah paling kalau ada orang pindah hanya pindah gang tapi masih satu RT minimal satu RW. Sebenarnya kehadiran mereka memang dirasa sedikit mengganggu oleh penduduk lama karena jika malam hari atau menjelang pagi, banyak sekali sepeda motor yang keluar masuk gang apalagi daerah tersebut sering digunakan pelarian para pencuri. Selain itu ditempat tersebut ada tempat bilyard, selama ini masyarakat menganggap permainan bilyard identik dengan minum-minuman keras dan perjudian. Banyak responden yang peneliti wawancarai menyatakan keresahannya, mereka takut

jika putra maupun putrinya ikut-ikutan bergabung dalam komunitas tersebut. Seringkali arena bilyard tersebut dilewati anak-anak yang berangkat maupun pulang sekolah dan mereka selalu mampir dan penasaran dengan permainan tersebut, nampaknya untuk hal ini para orang tua memang harus berhati-hati. Sekarang jika ada pemuda atau pemudi dari warga RT 3(RT tempat tinggal bapak Amrullah) yang berjalan kearah timur selalu dicurigai main di tempat bilyard tersebut.

3. BAPAK BAPAK AGUS (TNI-AL)

Bapak Agus tinggal di daerah bozem ini sudah 17 belas tahun, ia adalah anggota TNI AL.Istrinya bekerja sebagai guru,

Menurut pengakuan bapak Agus, beliau tidak begitu paham dengan asal usul bozem Moro krembangan. Beliau dulu pernah mendengar bahwa mulanya bozem Morokrembangan ini adalah laut dan rawa-rawa kemudian ada beberapa orang yang membuka lahan untuk dijadikan tambak. Oleh pemerintah kemudian diubah lagi dijadikan bozem karena saat itu kota sudah tidak dapat menampung air. Seiring dengan berjalannya waktu, arus urbanisasi dari penduduk desa ke kota semakin meningkat sedangkan kota sudah tidak mampu menampung lagi. Hal ini mengakibatkan beberapa penduduk urban tersebut mengambil jalan pintas yaitu dengan memanfaatkan lahan bozem. Awalnya mereka menempati atau memangkas sisi luar bozem yang telah mengering, satu persatu masuk kemudian sanak familinya diajak tinggal dan merasa betah yang pada akhirnya menetap dan begitu seterusnya. Meski tidak menutup kemungkinan bahwa penduduk asli Surabaya juga ikut menempati lahan bozem tapi itupun hanya sedikit. Kebanyakan dari mereka yang tinggal, jika dirunut adalah pendatang dari

Lamongan dan Madura. Mungkin karena besar dan lahir di Surabaya sebagian besar dari mereka mengaku sebagai orang Surabaya, padahal kakek nenek atau orang tua mereka adalah orang asli Lamongan atau Madura.

Sebagai seorang tentara dan pegawai negeri Bapak agus menyadari, bahwa tidak seharusnya beliau tinggal di tanah milik negara yang dimanfaatkan untuk pengairan atau penampungan air. Saat itu beliau bermaksud untuk tinggal sementara waktu saja tapi setelah beradaptasi dengan lingkungan sekitar bapak Agus mulai betah tinggal dan tidak ingin pindah. Selama ini jarang sekali diadakan gotong royong untuk membersihkan bozem itu sendiri, kebanyakan gotong royong yang diadakan hanya membersihkan lingkungan sekitar bozem dan pemukiman penduduk. Menurut bapak Agus warga sangat keberatan dan tidak mampu membersihkan bozem karena sudah terlalu banyak dan menumpuk sampah sampah tersebut. Apalagi dengan adanya enceng gondok yang memang sulit dibersihkan. Seharusnya pembersihan enceng gondok tersebut dibutuhkan penanganan khusus dan berkelanjutan sekaligus teratur, tidak seperti saat ini yang baru dibersihkan setelah muncul banyak. Sebaiknya masyarakat jangan dibiarkan begitu saja diberi tanggung jawab secara penuh untuk membersihkan bozem tapi sebaiknya turut dilibatkan. Jadi ada kerjasama antara pihak pemerintah dan warga. Dalam artian warga hanya bertanggung jawab menjaga kebersihan dan perawatan sehari-hari bozem, sedangkan pihak pemerintah yang mensponsori atau menangani pembersihan secara masal atau skala besar. Jika hal tersebut berjalan lancar maka bozem akan terawat dan bersih karena dirawat oleh dua pihak yang berkepentingan.

Bapak agus mencontohkan seperti di gadukan Utara yang saat ini terlihat lebih rapi, bersih dan indah bila dipandang mata, hal tersebut dapat terjadi tidak lepas dari peran pihak TNI AL yang berupaya membersihkan bozem dengan menyeluruh, baiki membersihkan sampah yang menumpuk sampai menjadi tanah ataupun enceng gondok yang tumbuh subur. Pihak TNI AL sangat bersungguh-sungguh melakukan pembersihan tersebut bahkan selama hampir 6 bulan, tentu hal ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu sangatlah membuang-buang uang bila perawatan tersebut tidak dilanjutkan alias dibiarkan begitu saja. Pihak TNI AL berpikir mengapa tidak mengajak warga berperan aktif dalam menjaga kebersihan bozem. Berangkat dari hal tersebut pihak TNI AL mengajak warga untuk berkerja sama dalam menjaga kebersihan bozem. Dengan cara memberi warga dana untuk memperindah bozem misalnya, membuat bak sampah, mengecat pagar, membuat taman dipinggir bozem.

Dulu sebelum dibuat taman pinggir bozem tersebut oleh warga dibuat kandang ayam, jemuran bahkan ada kamar mandi dan kakus. Sehingga pemandangannya terkesan sangat kumuh dan jorok belum lagi dengan kebiasaan warga yang membuang sampah di bozem, tetapi hal itu bukan kesalahan murni dari warga karena memang hampir seluruh pemukiman bozem tidak disediakan tempat pembuangan sampah. Memang beberapa warga di Gadukan Utara tidak semua menyambut baik kerjasama ini, mereka mengeluhkan ruang geraknya dibatasi dalam artian mereka sudah tidak boleh lagi menjemur pakaian pinggir bozem, maksimal didepan rumah. Selain itu pihak TNI AL selalu rutin mengontrol kebersihan minimal sehari sekali atau dua kali sehari bahkan jika terlihat dari seberang ada yang melanggar akan

datangi oleh petugas yang bersangkutan. Bapak Agus sangat menyukai cara-cara seperti ini karena warga perlu Diberi sedikit penekanan agar ter biasa dan sadar dengan pentingnya menjaga kebersihan. Toh jika terjadi banjir warga selalu menyalahkan pemerintah dan adanya pemukiman liar yang baru ada.

Selama 17 tahun tinggal di daerah bozem ini bapak Agus mengaku tidak pernah ada konflik baik antara warga dengan warga lainnya ataupun warga dengan pemerintah secara langsung. Tetapi bapak Agus juga mengutarakan bahwa sebenarnya beliau ataupun sebagian warga dibozem, memiliki keresahan-keresahan sendiri yaitu tentang status tanah yang tidak jelas. Bapak Agus mengaku jika ada warga yang ingin menjual bangunannya saat ini sangat kesulitan karena dalam perjanjian jual-beli harus disertai dengan tanda-tangan RT/RW, Lurah dan Camat. Padahal untuk saat ini menurut cerita bapak Agus, Camat sudah tidak mau tanda-tangan lagi. Yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan warga yang ingin pindah atau menjual bangunannya pada orang lain, bukankah hal ini sangat menghambat. Katanya warga disini termasuk yang sudah diijinkan tinggal meskipun hanya mengantongi HGB, toh warga disini juga dikenakan PBB.

Menurut cerita bapak Agus dahulu pernah ada pengurusan bukti kepemilikan tanah secara kolektif tetapi tidak jalan karena berbagai alasan. Bahkan ada informasi bahwa ada salah satu warga yang telah memperoleh bukti kepemilikan tanah atau tanahnya sudah bersertifikat hak milik. Jika itu memang benar kenapa kok yang lainnya tidak bisa atau surat tersebut asli tapi palsu. Terlepas dari semua itu bapak Agus juga mengingatkan bahwa ada peraturan tentang tanah-tanah milik negara, yang apabila sudah

ditempati lebih dari 15 tahun dapat menjadi milik warga yang telah menempatnya. Bapak Agus sempat menanyakan hal tersebut baik di kecamatan, kelurahan bahkan ke pemerintah kota, tapi beliau tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Pihak Kecamatan bersikukuh bahwa tanah milik negara atau fasilitas umum tidak dapat diperjualbelikan karena bertentangan dengan peraturan. Berbeda dengan pihak pemerintahan atau bagian Tata Kota, bapak Agus menemukan fakta lain yang cukup membingungkan karena saat itu bapak Agus mendatangi bagian Tata Kota dan menanyakan tentang status tanah di bozem yang jika dilihat pada gambar, pemukiman yang ditempati ini tidak ada pada gambar bahkan tidak jelas siapa yang berhak mengelolah. Antara pemerintah kota dan daerahpun terlihat saling tuding atau lempar tanggung jawab, memang sepertinya yang berwenang adalah dinas pengairan tetapi sifatnya tidak mutlak.

4. BAPAK EDDY KRISTANTORO (Pedagang)

Bapak Eddy sejak lahir telah tinggal di bozem, orangtua bapak Eddy sebelumnya sudah lama tinggal di bozem. Dia mempunyai pekerjaan sebagai pedagang yang memiliki toko dirumah, dari berdagang tersebut tidak kurang dari 1 juta keuntungan yang dia peroleh. Saat ini bapak Agus sudah menempati rumah sendiri dengan keluarga kecilnya, dia baru dikaruniai satu anak. Menurut bapak Eddy mau tidak mau dia harus merasa betah tinggal di didaerah bozem karena sudah lama tinggal dan sudah tidak ada tempat lagi. Sebagai seorang yang berwiraswasta pak Eddy merasa perlu menggunakan tabungan beasiswa berjangka untuk anaknya. Berdasarkan pengalamannya dia pernah kesulitan untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang sakit dan dia tidak mau pengalamannya tersebut terulang lagi sewaktu dia

menyekolahkan anaknya, dia takut kesulitan dengan biaya pendidikan anaknya nantinya.

Walaupun sudah bertahun-tahun tinggal disini bapak Eddy mengaku tidak begitu mengerti dengan asal usul bozem. Dia hanya tahu sebatas tempat ini dulunya adalah rawa-rawa yang dekat dengan laut. Sewaktu kecil bapak Agus menceritakan pemukiman ini tidak sepadat sekarang meskipun dulu juga sempat ada penggusuran. Jalan yang beraspal menurut bapak Agus dulu juga pemukiman penduduk, tetapi pada perkembangannya dinas pengairan membuat jalan agar dapat mengawasi bozem. Selama proses penggusuran seingat pak Eddy tidak ada masalah karena semuanya mendapat ganti rugi meskipun sedikit bahkan ada yang diganti dengan rumah. Pak Eddy menyadari bahwa rumah yang dia tempati adalah tanah milik Negara meskipun masing-masing instansi saling lempar ataupun saling memperebutkan. Pak Eddy tidak perlu merasa khawatir seperti penduduk Bozem lainnya karena dia sudah mengantongi sertifikat hak milik. Lain dengan mayoritas penduduk bozem lainnya yang hanya mengantongi izin hak guna bangunan..

Bapak Eddy juga menyadari bahwa saat ini bozem bisa dikatakan sangat kritis, karena sudah tidak mampu menampung air lagi malahan sudah beralih fungsi menjadi penampungan sampah. Memang hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan, selain itu tidak disediakan tempat pembuangan sampah bagi warga. Pemerintah juga ikut bersalah karena banjir yang terjadi bukan karena sampah saja tetapi juga lumpur, sebab selama 3 tahun terakhir ini warga yang kebanjiran bukan hanya kebanjiran air tetapi Lumpur yang tingginya mencapai 30 cm. Hal ini

terjadi karena Lumpur yang disedot dari bozem dibuang dipinggir bozem sehingga kesannya sama saja dengan memindah Lumpur ke sisi bozem lainnya. Banyak warga yang protes dengan kejadian tersebut bahkan menurut cerita pak Eddy ada warga yang mengadukan kejadian tersebut ke berbagai media cetak. Tapi langkah tersebut sudah terlambat karena sampai saat ini kalau hujan tetap saja banjir, malahan Lumpur bekas buangan tadi sudah menjadi tanah lapang yang sudah mengeras. Tidak jarang oleh warga tanah lapang tersebut dijadikan tempat jemuran, kandang temak bahkan lapangan. Saat ini tanah lapang tersebut kesannya seperti tegalan dan ada yang ditumbuhi ilalang-ilalang yang tinggi.

5. IBU SUPRAPMI (ibu rumah Tangga)

Ibu Suprapmi adalah penduduk yang baru satu tahun tinggal di pemukiman baru. Suaminya bekerja sebagai tukang service elektronik, tidak jarang pula didatangi oleh anak-anak yang belajar tentang elektronika biasanya yang datang belajar adalah anak-anak kuliah dan STM dari jurusan elektronika. Beliau dikaruniai satu orang putri yang sudah lulus SMA. Dulu putrinya sekolah di SMA Kristen bonafid, tapi beliau tidak kesulitan dengan biaya pendidikan putrinya karena putrinya mendapat beasiswa dari sekolahnya. Ibu Suprapmi hanya mengeluarkan biaya transportasi ke sekolah saja. Sebenarnya putrinya sangat berkeinginan melanjutkan sekolahnya sampai jenjang perguruan tinggi. Tapi karena tidak ada biaya niat itu diurungkan dan putrinya berniat bekerja saja untuk meringankan beban orang tuanya.

Dia tinggal di pemukiman yang saat ini sedang bermasalah dengan aparat pemerintah. Tempat tinggal ibu Suprapmi merupakan daerah yang dilarang untuk dibangun pemukiman dan tidak memiliki izin hak guna bangunan. Menurut cerita orang-orang, dulunya tempat tinggal ibu Suprapmi adalah saluran air yang menghubungkan sungai kearah bozem, jadi ibu Suprapmi tidak menyalahkan jika banyak orang yang menganggap pemukiman bozem ini banjir gara-gara ada pemukiman baru ini. Hampir semua tetangga ibu Suprapmi adalah orang baru semua paling lama hanya 5 tahun dan kadang-kadang ada yang belum saling mengenal. Tinggal di pemukiman ini memang sangat rentan terhadap masalah karena selain tidak mengantongi surat izin juga tidak diakui sebagai warga. Sehingga seluruh tetangga bu Suprapmi tidak mempunyai KTP atau tanda kependudukan lainnya. Mereka hanya mengantongi kartu penduduk musiman tapi itupun tidak semuanya.

Sebenarnya tanah yang ibu Suprapmi tinggal saat ini bukan miliknya tapi milik saudaranya. Saudara ibu Suprapmi tidak berani menempati daerah ini karena banyak orang Maduranya dan terlalu rawan. Awalnya beliau juga menolak membangun rumah disini apalagi tinggal dan menetap. Beliau sudah tidak punya pilihan lain karena harga rumah di Surabaya sangat tinggi jauh dari kemampuannya. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan menghitung untung ruginya, akhirnya beliau beserta keluarga kecilnya bersedia membangun. Dulu saudara ibu Suprapmi membeli tanah ini yang sudah terkapling-kapling dengan harga 4 juta, dan berukuran sekitar 5x11 meter. Saat ini harga tanah sudah naik 2x lipat, informasi ini diperoleh dari tetangga baru ibu Suprapmi. Masih jauh lebih murah dengan harga tanah yang telah

bersertifikat meskipun terbilang kampung tetapi penduduk disini tidak terlihat akrab, malah bisa dibilang individualistis. Mereka nampak terlena dengan kegiatannya masing-masing, yang pagi kerja langsung kerja jika pulang langsung masuk rumah. Meskipun kebanyakan dari mereka bekerja disektor informal atau tidak terikat pada waktu, jarang terlihat dari mereka bergerombol atau saling bercengkerama.

Untuk sementara waktu fasilitas yang bisa digunakan saat ini masih sebatas listrik saja, sedangkan untuk air warga membeli dari warga yang sudah memasang dengan tarif kurang lebih 1000 per menit. Memang sedikit merepotkan karena harus menunggu giliran untuk mengisi bak mandi, tapi warga tidak perlu "mengangsu" atau mengambil air dengan cara membawa bak tapi setiap aliran sudah diberi selang-sendiri-sendiri. Fasilitas lain yaitu telephone sudah mulai masuk jaringannya hanya tinggal menunggu waktu saja. Saat peneliti berkunjung disana nampak petugas Telkom sedang mengamati jaringan telephone yang akan dipasang. Tentu saja hal ini disambut gembira oleh warga dan tentunya ibu Suprapti. Pemasangan PDAM sangat sulit dilakukan karena factor lingkungan yang tidak memungkinkan dan selain itu harganya masin mahal, sehingga warga belum berani mengajukan permohonan.

V.2. RIWAYAT TINGGAL

Menurut cerita Ibu Liana, yang tinggal di daerah Bozem mulai sekitar 22 tahun yang lalu. Awalnya bozem ini adalah laut yang berbentuk rawa-rawa. Oleh penduduk sekitar sempat dimanfaatkan sebagai tambak, yang pada akhirnya berubah fungsi menjadi bozem. Menurut ibu Liana, dahulu

jalan yang beraspal itu –yang sekarang ada di sekitar bozem–adalah pemukiman padat. Pada tahun 1984 digusur oleh pemerintah –dinas pengairan. Bangunan yang digusur itu sendiri terletak sekitar 3 meter dari bibir bozem. Penduduk yang rumahnya digusur mendapat ganti rugi meskipun sedikit, karena hanya dihitung dari nilai bangunan.

Jalan yang dibangun (diaspal) tersebut oleh dinas pengairan dimaksudkan untuk kelancaran atau lebih mudah mengontrol bozem, tetapi dalam kenyataannya jalan beraspal tersebut justru dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lalu lintasnya dan mempermudah membuat rumah-rumah baru dari lahan sisa yang ada disekitar jalan beraspal tersebut, demikianlah seterusnya. Meskipun setiap ada pembangunan rumah baru kebanyakan tanpa adanya ijin secara formal, namun pertumbuhan bangunan baru begitu cepat, karena pihak pemerintah, menurut ibu Liana, tidak pernah memberi teguran sama sekali mulai dari tingkat Kotamadya sampai RT/RW, sehingga warga menganggap bahwa membangun didaerah bozem tersebut nggak ada masalah atau sah-sah saja.

Dari cerita dari ibu Liana, wajarlah kemudian dalam hasil penelitian ini terungkap bahwa sebagian besar responden (53,3 persen) mengaku bahwa mereka sudah tinggal di daerah bozem sudah hampir 10 tahunan, bahkan ada lima orang yang berterus terang kalau sudah lebih dari 30 tahun tinggal di daerah bozem tersebut. Suatu masa yang cukup lama ini cukup wajar kemudian kalau kemudian warga merasa cukup betah meskipun bertempat tinggal dan berdesak-desakan tinggal di lingkungan kampung tersebut.

Tabel 7
Lama Tinggal di Bozem Morokrembangan

Lama tinggal (tahun)	Frekuensi	Persentase
1-10	40	53,3
11-20	17	22,7
21-30	13	17,3
31-40	5	6,7
Jumlah	75	100.0

Sumber: Kuesioner no. 10

Minat responden untuk tinggal di daerah bozem sebagian besar (52 persen) mengaku atas kemauan sendiri, dan ada sekitar 36 persen merupakan kehendak orang tuanya atau turun-temurun.

Tabel 8
Orang Yang Mengajak Responden Tinggal Di Daerah Bozem

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Orang tua	27	36.0
Saudara	2	2.7
Teman	6	8.0
Kemauan sendiri	39	52.0
Lainnya.	1	1.3
Jumlah	75	100.0

Sumber: Kuesioner no. 10 A

Keterikatan emosional yang sudah lama pada lingkungan bozem, membuat masyarakatnya betah, hal ini diakui oleh 46,7 persen responden. Meskipun mereka setiap tahunnya harus rela rumahnya diterpa banjir kalau sedang musim hujan. Sedangkan 18,7 persen mengaku lebih murah hidup di lingkungan bozem. Meskipun kalau ditelusuri ternyata mereka membeli tanah tersebut pada seseorang yang telah mengkapling tanah, seperti yang pernah diungkapkan oleh Ibu Suprapmi, yang mendiami rumah saudaranya, dimana saudaranya sekitar 2 tahun yang lalu membeli kaplingan seluas 55 meter persegi (5x11) meter seharga 4 juta, dan menurut ibu yang

sudah sekitar satu tahun tinggal di bozem itu harganya sekarang sudah dua kali lipat. Sementara itu 14,7 responden lebih senang tinggal di Bozem, karena dekat dengan tempat kerja.

Tabel 9
Alasan Tetap Tinggal di Bozem

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Betah	10	13.3
Karena sudah terlanjur tinggal di sini lama	35	46.7
Lebih murah biaya hidupnya	14	18.7
Sudah mapan	5	6.7
Dekat dengan tempat kerja	11	14.7
Jumlah	75	100.0

Sumber: Kuesioner no. 24

Sudah lamanya—sekitar diatas 9 tahun— sebagian besar penduduk yang terkategori pemukiman liar dan kumuh tersebut tinggal di kawasan bozem, berdampak bahwa setiap usaha pembangunan di sekitar bozem yang akan dilakukan pemerintah kota, tidak bisa mengabaikan keberadaan para penduduk tersebut. Meskipun penduduk itu tergolong liar, namun apapun alasannya mereka telah tinggal lama diadaerah bozem dan telah "merawat" lingkungan bozem yang dulunya rawa tersebut menjadi tempat untuk hunian.. Selama ini keberadaannya juga seolah-olah direstui oleh pemerintah kota.

V.3. PROBLEM-PROBLEM

Pada dasarnya ada dua segi utama dari proses perkembangan kota, yaitu *perluasan* dan *agregasi* (Quinn, 1971). Yang pertama merujuk pada

pertumbuhan ruang lingkup kompleks kota dan yang kedua pada peningkatan konsentrasi penduduk di wilayah kota.

Surabaya, kota yang terbesar kedua di Indonesia juga tidak bisa terelakkan dengan proses perkembangan kota tersebut, salah satu indikator yang bisa dilihat dari terjadinya *perluasan* dan *agregasi* tersebut adalah terjadinya perkembangan kota yang hiperaktif—yang segera diikuti munculnya berbagai masalah pertanahan. Hal ini terjadi karena luas tanah kota yang relatif terbatas dan tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dan pembangun kota yang begitu pesat.

Salah satu bentuk konkrit dari persoalan tanah di Surabaya adalah di daerah bozem moro krembangan ini puluhan hektar tanah yang pada awal mulanya berfungsi sebagai lahan yang dipergunakan untuk penampungan air hujan, namun lama-kelamaan semakin derasnya arus urbanisasi dan pemerintah kota tak mampu menyediakan rumah bagi para urban, sehingga mereka secara mandiri memanfaatkan lahan-lahan kosong yang belum dimanfaatkan Pemkot untuk mendirikan tempat tinggal. Mula-mula hanya segelentir orang yang tinggal, namun lama-kelamaan ratusan orang sudah tinggal di daerah bozem ini. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya monopoli kasus di kota Surabaya, hampir di seluruh kota-kota besar, terutama di negara-negara berkembang yang mempunyai ciri khas adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah, seperti antara desa dan kota.

Berikut ini beberapa permasalahan yang penduduk yang tinggal sebagai penghuni liar di tanah negara tersebut. Ada dua problem utama yang selalu menghantui masyarakat di sekitar Bozem, yaitu masalah banjir, dan status tanah. Ada sekitar 52 persen responden mengaku tidak bisa berbuat

banyak menghadapi banjir, karena air itu datang dari limpahan bozem, malahan karena sudah tidak lagi dikeruk, banyak kejadian waktu musim hujan, banjirnya disertai lumpur dan masuk sampai rumah-rumah penduduk.

Sedangkan 29 persen responden masih memimpikan adanya sertifikat hak milik bagi tanah yang ditinggalinya. Apalagi mereka mengetahui kalau ada beberapa orang yang tinggal di daerah bozem tersebut sudah mengantongi sertifikat. Berbagai usaha sudah pernah mereka lakukan, seperti mendatangi kelurahan namun jawabannya selalu klasik, bahwa tanah sekitar bozem merupakan tanah negara. Tetapi yang selalu menjadi tanda tanya masyarakat bozem adalah kenapa ada beberapa orang yang bisa mendapatkan sertifikat? Inilah pertanyaan para warga yang belum mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pihak yang terkait dengan pertanahan mulai dari Kelurahan sampai Kotamadya. Sebuah pertanyaan yang apabila tidak ada jawaban yang memuaskan bisa mengandung kecemburuan sosial dan potensi memunculkan konflik yang manifes.

Tabel 10
Problem-Problem Yang Paling Merisaukan Responden

Jenis Problem	Frekuensi	Persentase
Tidak ada	1	1.3
Status tanah yang belum jelas	29	38.7
Penghasilan yang kecil	2	2.7
Banjir yang selalu datang tiap tahun	39	52.0
Pengurusan surat-surat di kelurahan dan kecamatan	1	1.3
Lainnya.	3	4.0
Jumlah	75	100.0

Sumber: Kuesioner no. 22

Ditambah lagi kasus munculnya kelompok perumahan baru disekitar Bozem (RW VII)—yang menempati tempat urukan Lumpur Bozem—yang ternyata mendapatkan restu dari Dewan agar diterbitkan sertifikat. Suatu kebijakan yang lagi-lagi mengundang kecemburuan bagi warga yang telah lama menempati daerah bozem dan cukup sulit untuk mendapatkan sertifikat rumahnya.

Persoalan status tanah ini menjadi penting untuk ditangani, karena tanah adalah ibarat darah dan daging, karena itu tanah merupakan suatu masalah hidup dan matinya manusia. Begitu pentingnya probleh tanah ini, bukan hanya persoalan pengurusan di pengadilan yang bersifat teknis, dan ekonomi semata, tetapi juga merupakan masalah politis yang penting, karena definisi tentang tanah dan praktek yang dijalankan dalam urusan pertanahan merupakan dasar dari peradaban maupun system kekuatan yang membentuk perilaku sehari-hari (lihat Pisani: McAuslan, 1986).

Manfaat dan Kendala

Dari 75 responden penelitian ini, sebanyak 62,7 persen menganggap bahwa keberadaan bozem sangat penting dalam rangka meminimalisasi munculnya banjir, oleh karena itu mereka cenderung bahwa pemberdayaan bozem itu dengan merapikan dan pembuatan plengsengan agar bisa menampung air hujan. Hanya sekitar 13 persen yang mengharapkan bozem dialihfungsikan menjadi tempat wisata atau untuk kepentingan bisnis lainnya.

Tabel 11
Pendapat Responden tentang Keberadaan Bozem

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Tidak perlu / tidak tahu	10	13.3
Dibiarkan seperti saat ini	2	2.7
Dijadikan tempat memancing	6	8.0
Dirapikan dan dibuat plengsengan agar bisa menjadi penampung air hujan	47	62.7
Lainnya.	10	13.3
Jumlah	75	100.0

Sumber: Kuesioner no. 30

Usaha pemberdayaan Bozem ini, menurut pendapat warga yang menjadi responden penelitian ini adalah persoalan menjaga dan memelihara keutuhan dan kebersihan bozem. Pemilihan ini bukan hanya kendala dana yang memerlukan dana yang cukup besar dalam perawatannya sehari-hari, tetapi juga diakui oleh beberapa responden dan nara sumber, bahwa masyarakat masih tergolong rendah dalam rasa memiliki, yang artinya dengan perilaku-perilaku sehari-harinya masih banyak yang membuang sampah di bozem, perilaku ini menurut warga karena pemerintah tidak membangun tempat penampungan sampah sementara di sekitar bozem tersebut, sehingga warga mengambil jalan pintas dengan membuang sampah di Bozem, dan juga mulai bermunculan kandang-kandang binatang piaraan yang ditempatkan dan dibangun di tempat urukan tanah dipinggir bozem, yang bukan hanya tidak sedap dipandang, tetapi juga menimbulkan persoalan pada musim hujan yang mengakibatkan banjir.

Diluar faktor biaya dan perilaku masyarakat tersebut, menurut beberapa nara sumber, adalah kurang tegasnya pemerintah baik dari kantor kotamadya sampai kelurahan pada warga yang membangun pada tempat-tempat saluran irigasi yang sebenarnya tanahnya sudah dibebaskan oleh dinas pengairan, namun karena kurangnya ketegasan aparat pemerintah, banyak sekali saluran irigasi yang akan difungsikan untuk menyalurkan air hujan yang menuju bozem, maupun yang keluar dari bozem, di atasnya dibangun rumah-rumah, dan kejadian itu terus dibiarkan tanpa ada teguran, sehingga rumah-rumah tersebut jadi permanen, dan dikemudian hari jelas akan mengalami kendala bahkan mungkin perlawanan dari warga yang tinggal di rumah tersebut apabila saluran irigasi tersebut akan di optimalkan lagi.

Tabel 12
Kendala-Kendala Dalam Pemberdayaan Bozem

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Kualitas airnya	5	6.7
Perawatan sehari-hari Bozem	58	77.3
Akan mendapat perlawanan dari masyarakat, bila masyarakat tidak diberi kompensasi	8	10.7
Lainnya	4	5.3
Jumlah	75	100.0

Sumber: Kuesioner no. 32

Kendala lainnya yang bisa dikatakan sebagai hal yang klasik hampir dialami oleh birokrasi di Indonesia dalam menjalankan pembangunannya adalah kurangnya dana untuk menjaga kelangsungan fungsi bozem sebagai penampung air agar tidak terjadi banjir. Kenyataan ini memang tidak bisa diabaikan dan tidak bisa selalu menjadi alasan penyebab mandeknya proyek

bozem tersebut, oleh karena itu memanfaatkan keberadaan lembaga-lembaga swasta untuk turut serta dalam pemberdayaan bozem patut dipertimbangkan. Namun keterlibatan lembaga swasta juga harus disertai dengan aturan-aturan main yang jelas, baik itu persoalan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh lembaga swasta, terutama adanya dampak yang positif bagi warga yang tinggal di daerah bozem.

Faktor keterbatasan dana ini diperburuk lagi dengan minimnya koordinasi antar lembaga birokrasi baik itu di propinsi maupun di pemerintah kota Surabaya yang selama ini mengklaim bertanggung jawab atas keberadaan bozem Morokrembangan.

Berbagai problem-problem di atas tidak bisa hanya diselesaikan secara parsial semata, tetapi diperlukan kebijakan yang holistic yang melibatkan peran birokrasi, swasta dan warga masyarakat, sehingga tercapainya fungsi utama Bozem secara maksimal sebagai pencegah banjir. Di lain sisi pemerintah dan lembaga swasta yang memberdayakan bozem memperoleh keuntungan finansial, tanpa merugikan masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Problem utama dalam pembangunan kota-kota besar di Indonesia adalah persoalan pertumbuhan jumlah penduduk, dan tanah. Kota Surabaya yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia menghadapi persoalan tersebut, seperti yang terungkap dalam temuan penelitian di daerah Bozem Morokrengan yang sudah dijelaskan rinci di analisis sebelumnya. Beberapa temuan pokok yang bisa diungkap adalah:

1. Penduduk Bozem Morokrengan yang sebagian besar merupakan para migran merasakan adanya ketidakadilan dan kekhawatiran tentang status tanah yang mereka tinggali sehari-hari. Hal ini bisa dilihat dari penerbitan sertifikat tanah. Ada beberapa penduduk yang sudah mendapatkan sertifikat atas tanahnya, sementara yang lain tidak bisa mendapatkan sertifikat tersebut.
2. Penduduk yang sudah lama tinggal di daerah Bozem, merasa perlunya adanya kontrol terhadap pertambahan jumlah penduduk di daerah bozem tersebut. Sinyalemen ini terbukti adanya kecenderungan para migran baru menempati tanah kosong yang sebenarnya tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan bozem.
3. Masih tumpang tindihnya lembaga yang berperan dan bertanggung jawab pada pengelolaan Bozem. Hal ini terlihat tidak adanya koordinasi antar lembaga birokrasi, misalnya dinas pengairan,

pemerintah propinsi, Pemerintah kota mulai dari dinas sampai kelurahan.

4. Pembersihan lingkungan bozem diharapkan oleh penduduk bisa berlangsung secara kontinu dan konsisten. Di lapangan terlihat semakin banyak tumpukan lumpur yang sudah memadat dan semakin banyaknya sampah yang menumpuk, sehingga kemampuan bozem menjadi tidak maksimal. Penduduk yang sudah lama tinggal di daerah bozem sudah merasakan adanya perubahan buruk pada lingkungan di Bozem tersebut, misalnya kalau dulu banjir masih bisa cepat surutnya, tapi pada tiga tahun terakhir, banjir sudah bercampur lumpur dan lama surutnya.
5. Penduduk berharap pemberdayaan bozem tidak meninggalkan tujuan utama adanya bozem yaitu mengurangi banjir, dan mereka cenderung memilih bozem dijadikan tempat wisata dibandingkan untuk fungsi bisnis lainnya.

Rekomendasi.

Dari temuan pokok tersebut, maka ada beberapa rekomendasi yang bisa ditawarkan, yaitu:

1. Perlunya ketegasan dan menciptakan rasa keadilan dari pihak pemerintah kota dalam menyelesaikan status tanah warga yang tinggal di daerah bozem sebelum melakukan pemberdayaan lebih lanjut pada bozem. Hal ini dilakukan karena persoalan tanah ini kalau tidak diselesaikan lebih dahulu akan menjadi kendala atau penghalang proyek apapun di sekitar bozem.

Rekomendasi ini muncul, karena dari beberapa hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh pakar ilmu sosial, kecenderungan menunjukkan bahwa dengan dalih untuk kepentingan pembangunan—terutama pembangunan ekonomi, acap terjadi birokrasi—sebagai kekuatan kelembagaan yang seharusnya membela rakyat—justru tidak bertindak sebagai mediator yang adil dalam menyelesaikan masalah tanah antara rakyat dengan kekuatan komersial dan lembaga lainnya. Banyak aparat birokrasi justru “kerjasama” (kongkalikong) dengan para pengusaha untuk menekan rakyat. Caranya: rakyat diminta kerelaannya untuk bersedia berkorban demi pembangunan, meskipun hasil pembangunan yang dimaksud acapkali tidak ikut bisa dinikmati rakyat. Keinginan untuk mengejar pertumbuhan—misal, pendapatan pemerintah kota—menyebabkan kekuatan kelembagaan dalam banyak hal lebih memberi kesempatan kepada kekuatan komersial untuk memanfaatkan lahan kota daripada warga kota sebagai kekuatan massa.

2. Perlunya pembangunan yang berprinsip *Community Base Oriented* (CBS) artinya proyek apapun yang akan dilakukan sebagian besar bisa dirasakan manfaatnya oleh penduduk di sekitar bozem. Misalnya, dalam rangka CBS tersebut mulai sekarang dibentuk disetiap RT/RW semacam kelompok yang dibina oleh lembaga yang terkait dengan persoalan lingkungan (baik LSM maupun pemerintah kota) untuk memahami arti pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat dan juga menampung aspirasi mereka tentang pembenahan lingkungannya.

Kelompok ini bisa berasal dari golongan muda, misalnya karang taruna, atau para pemuka di masing-masing RT/RW.

3. Sebelum adanya proyek berlangsung, jauh-jauh hari telah disosialisasikan dengan baik dampak positif dan negatif dari proyek tersebut pada masyarakat disekitar bozem, sosialisasinya bisa dimulai dari kelompok-kelompok yang ada di masing-masing RT/RW tersebut.
4. Keterlibatan lembaga swasta untuk pemberdayaan bozem memang tidak bisa ditawarkan lagi, karena minimnya dana yang dimiliki pemerintah. Namun keterlibatan swasta tetap harus ada kontrol agar tidak merugikan masyarakat, oleh karena itu perlu suatu komitmen yang dibuat antara lembaga swasta, pemerintah dan wakil masyarakat yang diwujudkan dalam peraturan yang jelas, seperti adanya PERDA yang mengatur keberlangsungan Bozem moro kreembangan.
5. Pemerintah kota dan DPRD-nya mempunyai *political will* yang sama dalam menjalankan pemberdayaan bozem dengan memprioritaskan dalam anggarannya dan keputusan politiknya.

Rekomendasi diatas akan berjalan lancar, dengan pra-syarat sebagai berikut:

1. Adanya peraturan yang jelas, lembaga pemerintah mana yang bertanggung jawab pada pengelolaan kawasan Bozem tersebut.
2. Adanya koordinasi yang intens antara pemerintah pusat (pemerintah propinsi) dan pemerintah kota dengan jajarannya sampai tingkat kelurahan.

3. Tersedianya dana yang pasti untuk keseluruhan kegiatan pemberdayaan bozem, mulai dari pembangunan awal sampai pada pemeliharannya selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, Robert, 1987, *Pembangunan desa Mulai Dari Belakang*, Jakarta: LP3ES
- Korten, david C., 1984, *Pembangunan yang Memihak Rakyat*, Jakarta :Yayasan Obor Indonesia.
- McAuslan, Patrick, *Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata*, 1986, Jakarta:Gramedia
- Mubyarto, 1985, *Peluang Dan Kesempatan Kerja*, Yogyakarta:BPFE
- Mubyarto, 1995, *Program IDT dan Keberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Mantra, Ida Bagus, 1989, *Mobilitas Sirkuler Dari Desa Ke Kota di Indonesia*, Jogja: P2K: UGM.
- Nasikun, 1980, *Urbanisasi berlebih, Involusi perkotaan dan radikalisme Politik di Negara-negara Berkembang*, Jakarta:Prisma
- Suyanto(Ed), 1995 *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya*, Surabaya: AUP
- Suparlan, Parsudi,1984, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Sinar Harapan
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 1992. *Pemantapan Definisi Masyarakat Rentan di Kodya Surabaya*, Kerjasama FISIP Unair dengan KLH Jakarta
- Lauer, Robert, 1989, *Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sumodiningrat, Gunawan, 1987. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Bina Rena Pariwisata.

KUESIONER

Pengantar:

Kami adalah Tim dari Sosiologi FISIP Universitas Airlangga Surabaya. Kami bermaksud mendata sekaligus mengidentifikasi berbagai problema yang dihadapi masyarakat di sekitar Bozem Morokembangan di Kota Surabaya.

Kami mohon anda semua bersedia mengisi seluruh pertanyaan yang diajukan dengan jujur dan terbuka. Atas kesediaan anda, sebelumnya kami menyampaikan terima kasih.

No	Pertanyaan	Koding
A. Identitas		
1	Nama:	
2	Umur saat ini: tahun	1 ()
3	Status Responden: 1. Belum menikah 2. Menikah	2 ()
4	Berapa jumlah anak responden : Orang	2a()
5	Tipe keluarga: 1. Nuclear Family 2. Ektended Family	3 ()
5a	Suku : 1. jawa 2. madura 3. lainnya,.....	3a()
6	Pendidikan terakhir: 1. Tidak sekolah 2. SD tidak tamat 3. Tamat SD 4. SLTP tidak tamat 5. Tamat SLTP 6. SLTA tidak tamat 7. Tamat SLTA 8. Diploma/Akademi/PT	4 ()
7	Pekerjaan utama responden: 1. Buruh bangunan 2. Buruh Industri 3.. Pedagang 4. PNS/ABRI 5. Sektor industri kecil 6. Sektor informal, lainnya sebutkan.....	5 ()
8	Apakah responden mempunyai pekerjaan sampingan? 1. Punya	6 ()

	2. Tidak punya	
9.	Jika punya, apakah pekerjaan sampingannya? 1. Buruh Bangunan 2. Buruh industri 3. Pedagang sektor informal 4. lainnya, sebutkan.....	7 ()
10	Berapa lama responden tinggal di daerah ini (Bozem), Tahun	8 ()
10 A	Siapa yang mengajak pertama kali tinggal di Bozem? 1. Orang tua 2. saudara 3. Teman 4. Kemauan sendiri 5. lainnya.....	9 ()
B. Kondisi Sosial-Ekonomi		
11.	Bagaimana Kondisi rumah responden: 1. Luas : 1. Dibawah 50 meter persegi 2. Antara 50 sampai 100 meter persegi 3. Diatas 100 meter persegi 2. Dinding : 1. tembok 2. semi tembok 3. papan 3. Lantai : 1. semen 2. tegel biasa 3. keramik 4. Atap : 1. Seng 2. genting 5. Fasilitas yang ada di rumah: 1. listrik : 1. ada 2. tidak ada 2. telpon : 1. ada 2. tidak ada 3. Parabola : 1. ada 2. tidak ada	10 () 11 () 12 () 13 () 14 () 15 () 16 ()
12.	Bagaimana status rumah: 1. Warisan 2. Hak milik 3. Sewa/kontrak 4. tanah negara 5. lainnya, sebutkan	17 ()
13.	Berapa rata-rata penghasilan keluarga responden per bulan? 1. Dibawah Rp. 250.000,- 2. Antara Rp. 250.000,- sampai Rp. 500.000,- 3. Antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 1 juta 4. Diatas satu juta rupiah	18 ()
14.	Berapa rata-rata pengeluaran responden per bulan? 1. Dibawah Rp. 250.000,- 2. Antara Rp. 250.000,- sampai Rp. 500.000,- 3. Antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 1 juta 4. Diatas satu juta rupiah	19 ()
15.	Jenis apasajakah pengeluaran responden: 1. Biaya telpon : 1. ada 2. tidak ada	20 ()

	2. Biaya listrik : 1. ada 2. tidak ada	21 ()
	3. Biaya pajak (PBB): 1. ada 2. tidak ada	22 ()
	4. biaya sewa : 1. ada 2. tidak ada	23 ()
	5. biaya pendidikan : 1. ada 2. tidak ada	24 ()
	6. lainnya, sebutkan,.....	25 ()
16.	Berapa jumlah tanggungan responden: orang	26 ()
C. Keterjangkauan pada Fasilitas Umum		

17 Bagaimana keterjangkaun pada fasilitas umum?

Jenis Fasilitas Umum	Ketersediaan	Kemudahan	Koding
1. Listrik/PLN	1. ada 2. Tidak ada	1. Mudah 2. Jauh/Sulit	27 () ()
2. PDAM	1. ada 2. Tidak ada	1. Mudah 2. Jauh/Sulit	28 () ()
3. Telepon/telkom	1. ada 2. Tidak ada	1. Mudah 2. Jauh/Sulit	29 () ()
4. Sekolah SD	1. ada 2. Tidak ada	1. Mudah 2. Jauh/Sulit	30 () ()
5. Sekolah SMP	1. ada 2. Tidak ada	1. Mudah 2. Jauh/Sulit	31 () ()
6. Sekolah SMU	1. ada 2. Tidak ada	1. Mudah 2. Jauh/Sulit	32 () ()
7. Pasar	1. ada 2. Tidak ada	1. Mudah 2. Jauh/Sulit	33 () ()
8. tempat ibadah	1. ada 2. Tidak ada	1. Mudah 2. Jauh/Sulit	34 () ()
9. lap. olah raga	1. ada 2. Tidak ada	1. Mudah 2. Jauh/Sulit	35 () ()
10. Klinik/puskesmas	1. ada 2. Tidak ada	1. Mudah 2. Jauh/Sulit	36 () ()

D. Problem-problem yang dihadapi

18 Dalam satu tahun terakhir, permasalahan apa saja yang pernah responden hadapi?

Jenis Masalah	Frekuensi	Koding
1. Kebutuhan Makan sehari-hari	1. Sering 2. Jarang 3. Tidak Pernah	37 ()
2. Biaya pengobatan	1. Sering 2. Jarang 3. Tidak Pernah	38 ()
3. Biaya sekolah anak	1. Sering 2. Jarang 3. Tidak Pernah	39 ()
4. Bayar hutang	1. Sering 2. Jarang 3. Tidak Pernah	40 ()
5. Ngurus KTP	1. Sering 2. Jarang 3. Tidak Pernah	41 ()
6. Ngurus pajak	1. Sering 2. Jarang 3. Tidak Pernah	42 ()
7. Ngurus tanah	1. Sering 2. Jarang 3. Tidak Pernah	43 ()
8. lainnya,.....	1. Sering 2. Jarang 3. Tidak Pernah	44 ()

19. Apabila menghadapi masalah-masalah tersebut , kemana mencari penyelesaiannya?

Jenis Masalah	Kepada/Tujuan	Koding
1. Kebutuhan Makan sehari-hari	1. Teman	45 ()
2. Biaya pengobatan	2. Saudara	46 ()
3. Biaya sekolah anak	3. Orang tua	47 ()
4. Bayar hutang	4. Tetangga	48 ()
5. Ngurus KTP	5. RT/RW	49 ()
6. Ngurus pajak	6. Kelurahan	50 ()
7. Ngurus tanah	7. Tokoh masyarakat	51 ()
8. lainnya,.....	8. DPRD Kota Surabaya	52 ()
	9. Lainnya, sebutkan.....	

20. Selama responden tinggal di daerah Bozem, pernahkah punya masalah/berkonflik dengan aparat pemerintah? 1. pernah 2. tidak pernah 53 ()

21. Jika pernah, permasalahannya apa?

Jenis Masalah	Frekuensi	Koding
1. Ngurus Air/PDAM	1. Sering 2. Jarang	54 ()
2. Ngurus listrik	1. Sering 2. Jarang	55 ()
3. Ngurus telpon/telkom	1. Sering 2. Jarang	56 ()
4. Bayar hutang	1. Sering 2. Jarang	57 ()
5. Ngurus KTP	1. Sering 2. Jarang	58 ()
6. Ngurus pajak	1. Sering 2. Jarang	59 ()
7. Ngurus tanah	1. Sering 2. Jarang	60 ()
8. lainnya,.....	1. Sering 2. Jarang	61 ()

22. Problem apakah yang paling merisaukan responden? 62 ()

1. status tanah yang belum jelas
2. penghasilan yang kecil
3. banjir yang selalu datang tiap tahun
4. pengurusan surat-surat di kelurahan dan kecamatan.
5. lainnya.....

E. KEPEDULIAN PADA BOZEM MOROKREMBANGAN

23.	Apakah responden merasa betah tinggal di daerah bozem morokrembangan ini? 1. Sangat betah 2. Betah 3. Kurang betah 4. Tidak Betah	63 ()
24.	Jika betah, mengapa? 1.karena sudah terlanjur tinggal disini lama	

	<p>2. Lebih murah biaya hidupnya.</p> <p>3. sudah mapan.</p> <p>4. dekat dengan tempat kerja</p> <p>5. dekat dengan sekolah anak-anak.</p> <p>6. lainnya, sebutkan.....</p>	64 ()
25.	<p>Jika tidak betah, kenapa?</p> <p>1. sering banjir pada musim hujan</p> <p>2. status tanah tidak jelas</p> <p>3. rawan kriminalitas</p> <p>4. Lainnya, sebutkan.....</p>	65 ()
26.	<p>Apakah di lingkungan responden pernah dilakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan di sekitar Bozem?</p> <p>1. Sering 2. jarang 3. tidak pernah</p>	66 ()
27.	<p>Jika pernah adanya gotong royong, siapakah yang mempunyai inisiatif?</p> <p>1. Aparat pemerintah</p> <p>2. Masyarakat</p> <p>3. Aparat pemerintah dan Masyarakat.</p>	67 ()
28.	<p>Menurut responden, apakah fungsi dari Buzem tersebut?</p> <p>1. Tahu, yaitu:</p> <p>2. Tidak tahu</p>	68 ()
29.	<p>Apakah perlu keberadaan Bozem dipertahankan?</p> <p>1. perlu. karena,.....</p> <p>2. Tidak perlu, karena</p> <p>3. Tidak tahu</p>	69 ()
30.	<p>Jika perlu, Bagaimana kelanjutannya?</p> <p>1. dibiarkan saja seperti saat ini</p> <p>2. dijadikan tempat memancing</p> <p>3. sebagai diuruk untuk dijadikan pemukiman</p> <p>4. dirapikan dan dibuat plengsengan agar bias menjadi penampung air hujan.</p> <p>5. Lainnya,.....</p>	70 ()
31.	<p>jika tidak perlu dipertahankan, akan dijadikan apa?</p> <p>1. pemukiman</p> <p>2. pertokoan</p> <p>3. jalan</p> <p>4. pendirian fasillitas umum lainnya.</p>	71 ()
32.	<p>Menurut responden, kendala apa saja yang akan muncul jika Bozem morokembangan diberdayakan?</p>	72 ()

	<ol style="list-style-type: none">1. Kualitas Airnya2. Perawatan sehari-hari bozem3. akan mendapat pertawanan dari masyarakat, bila masyarakat tidak diberi kompensasi.4. lainnya,	
--	---	--

33. Hal-hal yang perlu dicatat atau komentar responden?

Tanggal wawancara:
Pewawancara :